

Jurnal

ISSN 977-2722-7227

Widya



Vol. 27, Des 2022

Mengasah Ilmu, Menambah Wawasan, Menuju Profesional



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626

JURNAL WIDYA

Vol. 27, Des 2022

ISSN 977-2722-7227



SUSUNAN PENGURUS

Pelindung/ Penasehat

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Penanggung Jawab

Dr. Drs.H.Mudasir, M.Si,MPd

Editor

Drs.H.M Nasir Nata, SH MH

Dr. Drs.H.Mudasir, M.Si,MPd

Dra. Efrilia, M.Si.

Dra. Ratna Hustati, M.Si

Oktavianus Tampubolon, SH.,MH

Mery Fanada, S.Pd,SKM, M.Kes

Mitra Bastari

Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed

Prof. Dr. Didik Susatyo, M.Si.

Prof. Dr. Indawan, M.Pd

Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si.

Dr. Sri Sulastri, SH.M.Si

Staf/ Sekretariat

Dra.Sugiastuti, SS MM

Ir. Ibrahim Hamid, M.Eng

Holijah, SH, MH

Ratna Timuria, SE, MM

Dra. Srisnawati, M.Si

Drs. Sutralhis, M.Si

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139

Telp. (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No. 77 Bukit Besar Telp.0711-440646 Fax 0711-445626

P A L E M B A N G

KATA PENGANTAR

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2014 dan Nomor 8 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka kreditnya, diantaranya ditegaskan bahwa kegiatan Widyaiswara adalah : “ *Membuat karya tulis ilmiah, Penyusunan Bahan Ajar/ Materi Pendukung Modul*”. Sehubungan dengan hal tsb. maka saya menyambut baik atas diterbitkannya : “***JURNAL WIDYA***”.

Jurnal ini kami sambut dan kami hargai, mengingat di satu sisi akan memperkaya wawasan bagi yang bersangkutan dan juga akan menambah kontribusi pengetahuan bagi peserta Diklat. Oleh karena itu Jurnal Widya tersebut dapat dijadikan bahan bacaan bagi yang memerlukannya terutama yang bersangkutan.

Usaha dan Karya semacam ini kiranya dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan iptek, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan ketajaman pola pikir yang rasional serta profesional.

Demikian, mudah-mudahan Jurnal ini ada manfaatnya.

Palembang, Desember 2022

KEPALA BPSDMD

PROV. SUMSEL

dto

Hj. Tarbiyah, S.Pd., M.M

NIP. 196410131984062001

Pembina Utama Madya /IVd

KATA PENGANTAR

Jurnal Widya merupakan karya tulis ilmiah dari hasil suatu penelitian di sajikan untuk memenuhi atau sebagai kegiatan profesi para widyaiswara di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan widyaiswara Indonesia pada umumnya. Jurnal Widya ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Materi Jurnal ini berisikan uraian-uraian singkat dari hasil pengkajian tentang pelayanan public, Administrasi public, kebijakan public, analisis diklat, dan lain lain, yang telah di susun dan sunting dari berbagai literatur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu harapan kiranya dapat diterima sesuai dengan harapan kita bersama, yang berisi: “Review: Digitalisasi Penginformasian Persyaratan Proses Pengajuan PBB-P2 Dan BPHTB Kota Pagar Alam, Fktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyebab Kematian Pada Penderita Decompensasio Cordis (Gagal Jantung), Teknik Pengolahan Limbah Domestik Rumah Sakit, Program Pelaksanaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Pengaruh omset UMKM dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Palembang, dan Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palembang”.

Kepada para Widyaiswara kami sebagai pengurus jurnal berharap kiranya ada tindak lanjut / berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan ini, minimal tiga bulan sekali dapat diterbitkan. Disamping itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, tim redaksi akan terima dengan segala senang hati.

Palembang, Desember 2022

Redaksi

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Review: Digitalisasi Penginformasian Persyaratan Proses Pengajuan PBB-P2 Dan BPHTB Kota Pagar Alam	1
2. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyebab Kematian Pada Penderita Decompensasio Cordis (Gagal Jantung)	4
3. Teknik Pengolahan Limbah Domestik Rumah Sakit	24
4. Program Pelaksanaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	37
5. Pengaruh omset UMKM dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Palembang	56
6. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palembang ...	65
7. Tinjauan Kritis Keberadaan Organisasi Pemerintah Pasca Pemberlakuan Desentralisasi	73

REVIEW : DIGITALISASI PENGINFORMASIAN PERSYARATAN PROSES PENGAJUAN PBB-P2 DAN BPHTB KOTA PAGAR ALAM

Efrilia

Widyaiswara BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Telepon: +62-8127318503

E-mail: eviprabuagung@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dari waktu ke waktu. Hal ini terkait dengan fungsi pajak itu sendiri yaitu sebagai fungsi budgetair dan regulierend. Fungsi budgetair, yakni pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Fungsi regulierend, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan pertahanan keamanan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah, dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa sekarang ini. Namun pemungutan atau pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus tetap memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan masyarakat berpenghasilan rendah yang diwujudkan dalam nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak.

Pajak Bumi Dan Bangunan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Tetapi sejak adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terdapat pembaruan disektor pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : wajib pajak, retribusi, pajak sumber pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan

PENDAHULUAN

Kota Pagar Alam berdiri sebagai Kota Otonom dan terpisah dari Kota Pagar Alam mulai tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115). Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di bagian selatan provinsi tersebut, yang

terdiri atas 5 Kecamatan dan 35 Kelurahan dengan luas wilayah 633,66 Km² atau 63.366 Ha. Kota Pagar Alam merupakan salah satu Kota di Sumatera Selatan yang memiliki sumber daya alam dan potensi yang cukup melimpah, dimana Kota Pagar Alam merupakan kota pariwisata dan agribisnis yang menjadi salah satu andalan di Sumatera Selatan. Berdasarkan potensi tersebut, dapat diperkirakan sesungguhnya Kota Pagar Alam memiliki potensi yang tinggi pada bidang pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dari waktu ke waktu. Hal ini terkait dengan fungsi pajak itu sendiri yaitu sebagai fungsi budgetair dan regulerend. Fungsi budgetair, yakni pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Fungsi regulerend, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan pertahanan keamanan.

Sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi *self assessment system*. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/ menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Junto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan arahan baru dalam pembangunan nasional yang bersifat top down menjadi bottom up, masing-masing daerah diberi kesempatan untuk melaksanakan proses pembangunan yang didasarkan pada ide-ide, nilai social, tehknologi serta potensi sumberdaya lokal. Hal ini menuntut adanya peran aktif pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan untuk menggali, mengembangkan dan mengelola potensi sosial ekonominya dalam rangka memperkuat pembangunan yang berkelanjutan termasuk di Kota Pagar Alam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah, dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Perkembangan Teknologi sekarang telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dalam hal informasi yang semula bersifat terbatas, kini dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang di dapat oleh masyarakat menjadi tanpa batas. Selama ini mungkin akses teknologi informasi dan komunikasi hanya di perkotaan saja, namun saat ini penduduk di pelosok pedesaan juga dapat memperoleh informasi dan komunikasi melalui kemajuan teknologi dimana saat ini hampir semua informasi yang diperoleh masyarakat sudah berbasis digital.

PERMASALAHAN

Belum tersedianya Pelayanan Informasi persyaratan pengajuan dan informasi lainnya PBB P2 dan BPHTB sesuai aturan yang berlaku berbasis Digital/Website.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan yang harus dilakukan untuk penyebaran informasi persyaratan proses pengajuan PBB-P2 dan BPHTB berbasis digital ini adalah

1. Konsultasi dengan mentor dalam pelaksanaan aksi perubahan
2. Melaksanakan rapat koordinasi untuk mensosialisasikan dan persamaan persepsi di lingkungan internal Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3. Membentuk Tim Efektif di Bidang Pendataan dan Pendaftaran
4. Melaksanakan koordinasi untuk mensosialisasikan dan permohonan

dukungan dengan bidang yang lain di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

5. Pembuatan SOP terkait Media Pelayanan Informasi Persyaratan Proses Pengajuan PBB-P2 dan BPHTB pada Website
6. Pelaksanaan Pembuatan Website sebagai media digital dalam penyebarluasan informasi persyaratan pendaftaran PBB-P dan BPHTB
7. Pelaksanaan Penggunaan Website, Pengunggahan Konten Informasi persyaratan PBB-P2 dan BPHTB serta Informasi lainnya oleh Admin.
8. Melaksanakan koordinasi ke Bidang Aplikasi Tata Kelola Informasi dan E-Gov pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam untuk mensosialisasikan dan permohonan dukungan Aksi Perubahan.
9. Sosialisasi ke Pegawai Kelurahan Jangkar Mas, Kelurahan Beringin jaya, Kelurahan Tebat Giri Indah. yang menjadi perwakilan dari 35 Kelurahan yang ada di Kota Pagar Alam yang selanjutnya dapat menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat tentang Persyaratan pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini berdasarkan deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana penyebarluasan informasi persyaratan proses pengajuan PBB-P2 dan BPHTB berbasis digital

HASIL PEMBAHASAN

1. Pembuatan SOP terkait Media Pelayanan Informasi Persyaratan Proses Pengajuan PBB-P2 dan BPHTB pada Website
2. Pembuatan Website sebagai media digital dalam penyebarluasan informasi persyaratan pendaftaran PBB-P dan BPHTB
3. Penggunaan Website, Pengunggahan Konten Informasi persyaratan PBB-P2 dan BPHTB serta Informasi lainnya oleh Admin

4. Sosialisasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pagar alam tepatnya melalui bidang aplikasi tata kelola informasi dan E-Gov
5. Melakukan Sosialisasi ke Pegawai Kelurahan Jangkar Mas, Kelurahan Beringin jaya, Kelurahan Tebat Giri Indah. yang menjadi perwakilan dari 35 Kelurahan yang ada di Kota Pagar Alam sebagai perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat tentang Persyaratan pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB

KESIMPULAN

Pembuatan Website sebagai media digital dalam penyebarluasan informasi persyaratan pendaftaran PBB-P dan BPHTB dengan menyediakan SOP terkait media Pelayanan Informasi Persyaratan Proses Pengajuan PBB-P2 dan BPHTB pada Website, Pengunggahan Konten Informasi persyaratan PBB-P2 dan BPHTB serta Informasi lainnya serta melakukan sosialisasi kepada pegawai kelurahan Jangkar Mas, Kelurahan Beringin Jaya, serta kelurahan Tebat Giri indah yang menjadi perwakilan dari kelurahan yang ada di Kota Pagar Alam

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25*
- Peraturan Pemerintah 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- SK Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 59 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah
- Alfrianti Sauran, Strategi Manajemen, Universitas Mercusuar 2018
- Azyumardi Azra, Kepemimpinan Dalam Islam, 2012
- Muhammad Maulana, Pelayanan Publik, <https://academia.edu>
- <https://www.maxmanroe.com.html>
- <https://www.kubikleadership.com>
- <https://dosenpendidikan.co.id>

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYEBAB KEMATIAN PADA PENDERITA DECOMPENSASIO CORDIS (GAGAL JANTUNG)

HJ. EKA YUNIAR SKM, MKES.

ABSTRAK

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang berperan dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang penting bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional

Decompensasio Cordis atau gagal jantung adalah salah satu gangguan aliran darah akibatnya adanya kegagalan jantung untuk memompakan darah kedalam sistem sirkulasi darah dalam jumlah yang normal.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana hubungan umur, jenis kelamin pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kematian penderita gagal jantung jenis penelitian digunakan adalah Cross Sectional Study pada 34 penderita gagal jantung, Analisa data yang digunakan adalah analisis Universal dan bivariat, distribusi frekuensi chi square dari analisis ini penyakit gagal jantung banyak terjadi pada laki-laki dengan kelompok umur 45-65 tahun.

Mengingat dampak dari penyakit tersebut dan berbagai masalah yang timbul, maka penanganan yang serius terutama perawatan dan pengobatan harus segera dilakukan agar penderita tidak jatuh pada keadaan yang lebih buruk, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan informasi yang cukup pada penderita, keluarga dan masyarakat sehingga angka kematian dapat di kurangi.

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang kesehatan cukup mendapat perhatian dari pemerintah melalui Departemen Kesehatan secara aktif mewujudkan kesehatan bagi semua penduduk dimasa yang akan datang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) bahwa: tujuan pembangunan Kesehatan Nasional, ialah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi Setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat umum dari tujuan nasional. Upaya dan kegiatan operasional dibidang kesehatan telah ditata secara terarah, dipacu agar lebih dinamis, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat.

Tidak semua orang beruntung dikaruniai kesehatan sampai hari tua. Sebagian besar pernah sakit bahkan ada yang serius, seperti penyakit jantung Seperti halnya organ lain dari tubuh manusia maka jantung dan pembuluh darah yang merupakan Sistem kardiovaskuler memiliki fungsi dan cara kerja yang khusus. Jantung berfungsi sebagai motor

sekaligus pompa yang mengalirkan darah keseluruh tubuh. Artinya Jantung memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, jantung yang tidak dapat bekerja sempurna akan mengancam keselamatan jiwa. Dalam dunia kedokteran gagal jantung lebih dikenal dengan Decompensasio Cordis.

Perhatian terhadap penyakit tidak menular makin hari makin meningkat, karena frekwensi kejadian pada masyarakat semakin meningkat pula. Dan tiga penyebab utama kematian (WHO, 1990) penyakit Jantung koroner, diare dan stroke, dua diantaranya adalah penyakit tidak menular,

Selama ini epidemiologi kebanyakan berkecimpung dalam menangani masalah penyakit menular. Perkembangan sosio-ekonomi dan kultural bangsa dan dunia kemudian menuntut epidemiologi untuk memberikan perhatian kepada penyakit tidak menular karena sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Framingham Study adalah tonggak sejarah penting perkembangan epidemiologi di bidang penyakit tidak menular. *Framingham Study* adalah study yang dilakukan terhadap

penyakit *cardiovascular* dilakukan di Framingham sebuah komuniti dinegara bagian *Massachussets*, USA yang berkependudukan prospektif yang ingin menentukan faktor resiko penyakit jantung dengan mengamati perkembangan penduduk Framingham sebanyak 2536 lelaki 2875 wanita kulit putih. Penelitian lain yang mencoba mengidentifikasi faktor risiko penyakit jantung adalah yang disebut MRFIT (*Multiple Risk Factor Intervention Trial*). Berbeda dengan Framingham Study, penelitian ini adalah sebuah percobaan intervensi.

Menurut WHO (1990) kematian karena penyakit Jantung dan Pembuluh Darah adalah 12 juta / tahun, pembunuh nomor satu umat manusia. Dibandingkan dengan kematian yang disebabkan oleh diare (5 juta), kanker 4,8 juta dan TBC (3 Juta) Padahal penyakit jantung dan pembuluh darah adalah penyakit *preventable disease*, penyakit yang dapat di cegah, dimana 50% kematian dini dapat dicegah dengan upaya pencegahan mengenai perubahan gaya hidup.

Di Indonesia, berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga (SKRT) Tahun 1986, dilaporkan bahwa mortalitas penyakit kardiovaskuler di Indonesia adalah 9,7% dan berada pada peringkat tiga. Dan tak kalah pentingnya bahwa kedudukan penyakit ini cenderung makin tinggi dan hingga akhir-akhir ini dianggap sebagai peringkat pertama penyebab kematian di Indonesia terutama daerah perkotaan.

Sejarah perkembangan perhatian terhadap penyakit jantung ditandai dengan berbagai studi besar yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan percobaan klinik obat - obat penyakit jantung Sebagai contoh Framingham Study yang terkenal, MRFIT (*Multiple Risk Factor Intervention Trial*), SAVE (*Survival and Ventricular Enlargement*), SMILE (*Study of Myocardial Infarction Late Evaluation*) dan survei monica di Jakarta.

Mengenai prognosa penyakit jantung kronik, Tower Homlet (london) melakukan penelitian pada 100 penderita serangan jantung 25 mati mendadak, 75 yang dapat mencapai Rumah Sakit, 15 meninggal (1 meninggal di IGD, 8 meninggal dalam perawatan minggu pertama, 4 meninggal dalam perawatan lanjut, 2 setelah resusitasi) 60 dapat keluar RS, 5 meninggal tahun pertama 55 selanjutnya hidup 1 tahun

1.2 Rumusan Masalah

Tingginya kematian karena gagal jantung

- a. Adanya hubungan antara umur, Jenis kelamin pekerjaan dan pendidikan dengan kematian penderita gagal jantung

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Memperoleh informasi faktor-faktor yang berhubungan dengan penyebab kematian penderita gagal jantung.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik penderita gagal jantung menurut umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.
- b. Mengetahui hubungan kematian dengan umur penderita gagal jantung
- c. Mengetahui hubungan kematian dengan jenis kelamin penderita gagal jantung
- d. Mengetahui hubungan kematian dengan pendidikan penderita gagal jantung
- e. Mengetahui hubungan kematian dengan pekerjaan penderita gagal jantung

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman dan kemampuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

1.4.3 Bagi Insitusi P'endidikan

Sebagai bahan pengajaran dan pemantapan proses belajar mengajar di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Gagal Jantung

Gagal jantung (Decompensatio Cordis / Heart failure) adalah keadaan jantung tidak mampu lagi memompakan darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan Sirkulasi badan untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada keadaan tertentu, sedangkan tekanan pengisian ke dalam Jantung masih cukup tinggi (Soeparman, 1987).

2.2 Anatomi Jantung

Jantung merupakan organ berotot, berbetuk kerucut, berongga dengan basis di atas dan puncaknya di bawah. Beratnya pada orang dewasa kira-kira 220-260 gram. Jantung berada dalam rongga mediastinum, antara paru kanan dan kiri. Lapisan jantung (perikardium) terdiri dari dua bagian yaitu perikardium viseral dan perikardium perital. Antara kedua lapisan tersebut berisi sedikit cairan pelumas untuk mengurangi gesekan yang disebabkan oleh gerakan memompa jantung. Dinding jantung mempunyai tiga lapisan yaitu :

1. Epikardium atau lapisan terluar
2. Miokardium (lapisan berotot) atau lapisan tengah yang merupakan lapisan inti.
3. Endokardium atau lapisan dalam, terdiri dari jantung endotel dan selaput lendir yang melapisi permukaan jantung

Jantung terbagi oleh sebuah septum menjadi belahan kiri dan kanan. Setiap belahan kemudian dibagi dalam dua ruang, bagian atas disebut atrium dan bagian bawah disebut ventrikel. Dinding ventrikel kiri lebih tebal sebab kekuatan kontraksi dari ventrikel kiri lebih jauh lebih besar dari yang Kanan. Dinding atrium kanan tersusun atas otot-otot yang lebih tipis berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah dan penyalur darah venosa yang berasal dari vena sistemik yang mengalir ke ventrikel sebelah kanan dan paru.

Jantung memiliki empat jenis katup yaitu

1. Katup Trikuspidalis (katup tiga daun), terletak antara, atrium kanan dan ventrikel kanan
2. Katup Mitral (katup dua daun), terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. sering disebut juga dengan katup Bikuspidalis.
3. Katup Aorta, terletak antara ventrikel kiri dan aorta
4. Katup Pulmonal, terletak antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis.

Keempat katup jantung tersebut berfungsi mempertahankan aliran darah melalui keempat bagian jantung dengan arah yang tetap. katup-katup ini membuka dan menutup secara pasif, menanggapi tekanan dan perubahan isi di dalam bagian bagian jantung dan pembuluh darahnya.

Katup Trikuspidalis dan Katup Mitral disebut katup Atrioventrikuler (Katup AV). Daun-daun katup AV ini melekat pada korda tendinae ini sangat halus tetapi kuat dan tahan lama. Daun-daun katup AV ini melekat pada korda tendinae. Berfungsi untuk menyokong katup pada waktu ventrikel berkontraksi agar daun katup itu tidak membalik atau terdorong masuk kedalam atrium.

Katup Aorta dan Katup Pulmonalis disebut sebagai Katup Semilunaris. Kedua katup ini bentuknya sama Katup Semilunaris ini menghalangi jangan sampai darah mengalir kembali dari aorta atau arteri pulmonalis ke dalam ventrikel sewaktu ventrikel dalam keadaan istirahat

2.3 Fisiologi Jantung

a. Sistem Sirkulasi Darah Pada Jantung

Darah yang berasal dari pembuluh darah vena sistemik pada sirkulasi sistemik masuk kedalam atrium kanan melalui vena kava superior, vena kava inferior dan Sinus koronarius. Sekitar 80% darah dari atrium akan mengalir secara pasif ke dalam ventrikel kanan melalui katup trikuspidalis, sedangkan 20%-nya dari pemasukan darah kedalam ventrikel terjadi selama kontraksi atrium berlangsung arah dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis ke paru.

Atrium kiri menerima darah yang sudah dioksigenisasi dari paru melalui keempat vena pulmonalis. Darah mengalir dari atrium kiri ke dalam ventrikel kiri lewat katup mitral, Ventrikel Kiri memompakan darah kedalam aorta dengan tekanan tinggi.

Arteri koronaria kanan dan kiri meninggalkan aorta dan kemudian bercabang menjadi arteri-arteri yang lebih kecil Arteri-arteri ini mengitari jantung dan mengantarkan darah ke semua organ tubuh. Darah yang kembali dari jantung terutama dikumpulkan oleh sinus koronaria dan langsung kedalam atrium

b. Sistem Persyarafan Pada Jantung

Sistem Kardiovaskuler dipersyarafi oleh serabut-serabut sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem syaraf simpatis dan Sistem syaraf parasimpatis. Kedua sistem syaraf ini mempunyai efek saling berlawanan dan bekerja saling dipengaruhi oleh nervus accelerans berfungsi memperlancar pekerjaan jantung

c. Sirkulasi Darah

Sirkulasi darah merupakan Suatu sirkulasi dan sistem yang bekerja terus menerus yang terdiri dari fungsi jantung itu sendiri dan pembuluh-pembuluh darahnya seperti dalam keteraturannya. Sirkulasi darah Peredaran Darah Kecil :

Darah dari jantung ventikel dekstra —————> valvula semilunaris —————> arteri Pulmonalis —————> paru kiri dan kanan —————> vena pulmonalis,

Peredaran Darah Besar :

Darah dari jantung ventikel dekstra —————> valvula semilunaris aorta —————> aorta —————> Arteri —————> arteriola —————> kapiler arteri —————> kapiler vena —————> Venous —————> vena kava —————> atrium dekstra.

Untuk kedua sirkulasi ini saling berhubungan dan siklusnya selalu berkesinambungan.

d. Volume Darah Yang Beredar

Pada tubuh yang sehat atau orang dewasa terdapat darah sebanyak $\pm 1/13$ dari berat badan atau kira-kira 5 liter. Jumlah tersebut tidak sama pada tiap individu, tergantung pada umur, pekerjaan, keadaan jantung dan pembuluh darah.

Fungsi darah

1. Sebagai alat pengangkut, yaitu :
 - 1.1 Membawa oksigen dari paru keseluruhan tubuh.
 - 1.2 Mengeluarkan CO₂ dari Jaringan ke paru
 - 1.3 Menyerap makanan
 - 1.4 Mengangkut dan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui keringat dan ginjal.
2. Sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit dan racun, dalam hal ini adalah peran leukosit zat anti racun lainnya.

2.4 Klasifikasi

- a. Ditinjau dari jantung yang terkena, maka gagal jantung dapat dibagi menjadi, tiga jenis, yaitu :
 - Decompensatio Cordis Dekstra / gagal jantung kanan.
 - Decompensatio Cordis Sinistra / gagal jantung kiri
 - Decompensatio Kongestif, yaitu jika gangguan kiri dan kanan

maupun vaskularisasinya dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar.

Secara garis besarnya dapat disimpulkan tentang peredaran darah besar dan kecil melalui skema berikut

Seperti yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa : gagal jantung kiri, gagal jantung kanan, gagal jantung Kongestif.

- b. Berdasarkan Dispnea dan latigua telah ditetapkan klasifikasi gagal jantung berdasarkan New York Heart Association sebagai berikut :

Kelas I	: tidak ada keluhan
Kelas II	: simptom pada pekerjaan biasa
Kelas III	: simptom pada pekerjaan ringan
Kelas IV	: simptom waktu istirahat

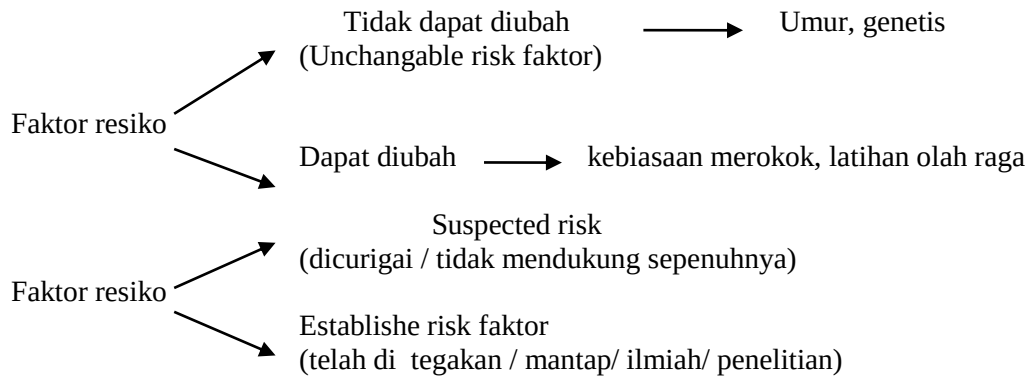
2.5 Etiologi

Terjadinya gagal jantung dapat disebabkan oleh berbagai hal menurut gangguan yang ada pada jantung itu sendiri maka penyebab gagal jantung adalah sebagai berikut

Faktor Resiko

Pengertian :

Faktor risiko suatu penyakit adalah faktor-faktor yang diyakini meningkatkan risiko timbulnya penyakit yang bersangkutan dan berapa besar kemungkinan sakit dari orang yang sehat.



Faktor resiko berkaitan dengan terjadinya arteriosklerosis

1. Faktor yang dapat diintervensi
 - genetis / riwayat keluarga
 - Usia
 - Jenis kelamin
 - Anatomi koroner
 - Profil lipoprotein
 - Faktor Metabolik
2. Faktor risiko yang dapat diintervensi
 - Rokok
 - Hipertensi
 - Hiperkolesterolemia
 - Hiperglisemia
 - Faktor riwayat keluarga dengan iskemik jantung
3. Faktor Perilaku
 - Kurang gerak
 - Stress / tegang
 - Sosial
 - Jenis kepribadian

Keterangan

- MEROKOK

Keadaan jantung dan paru-paru mereka yang merokok tidak akan dapat bekerja secara efisien. Mereka mempunyai risiko yang tinggi PJK, Stroke, Bronkitis yang kronis bahkan juga kanker. Karena itu bila anda merokok anda mengeluarkan uang jauh lebih banyak daripada harga rokok itu, karena sesungguhnya anda akan mengeluarkan biaya perawatan kesehatan sepanjang perjalanan hidup anda. (Tman Soeharto, 2003)

Menelusuri kenyataan-kenyataan sebagai berikut

- Asap rokok mengandung nikotin yang memacu pengeluaran zat-zat seperti adrenalin. Zat ini merangsang denyut jantung dan tekanan darah.
- Asap rokok mengandung Karbon monoksida (CO) yang memiliki kemampuan jauh lebih kuat daripada sel darah merah (hemoglobin) dalam hal menarik atau menyerap oksigen, sehingga menurunkan kapasitas darah merah tersebut untuk membawa oksigen ke jaringan-jaringan termasuk jantung
- Merokok dapat "menyembunyikan: angina, yaitu sakit dada yang berarti adanya sakit jantung
- Perokok dua atau tiga kali lebih mungkin terkena stroke dibanding mereka yang tidak merokok.
- Terlepas dari berapa banyak rokok yang dihisap sehari merokok terus menerus dalam jangka panjang berpeluang besar menderita penyumbatan arteri di leher.
- Perokok mudah mengalami kejang kaki pada waktu olahraga, karena penyumbatan pada pembuluh arteri di kaki.
- Merokok menempatkan seseorang lebih berisiko terhadap kanker paru
- Merokok menurunkan kadar kolesterol baik (HDL) dalam darah yang berarti meningkatkan risiko penyakit jantung kronik.
- Perempuan yang merokok mengalami penurunan HDL lebih banyak dari laki-

laki. Mereka yang merokok dua puluh batang atau lebih perhari, mengakibatkan penurunan HDL. Sebesar 11% untuk laki - laki dan 14% untuk perempuan.

- HIPERTENSI

Kalau tekanan darah tinggi dibiarkan tanpa perawatan tepat, jantung harus memompa dengan sangat kuat untuk mendorong darah ke dalam arteri, lama - kelamaan dinding otot jantung akan semakin tebal. Sebuah jantung yang membesar abnormal adalah jantung yang tidak sehat karena kaku dan irama denyutnya tidak teratur. hal ini menjadikan pompa kurang efektif dan akhirnya akan menyebabkan kegagalan

jantung sehingga mengakibatkan akumulasi jumlah zat cair dan gas dalam tubuh. Zat cair dan gas itu berakumulasi dalam paru- paru, hati, perut, dan kaki. penderita menjadi lemah dan tidak mampu melakukan aktifitas fisik. Akhirnya kongesti cairan dalam paru-paru menjadi lebih buruk dan pasien kehabisan nafas sekaligus istirahat

Kriteria Hipertensi

Tekanan darah umumnya diukur dengan manometer air raksa yang dinyatakan sebagai rasi sistolik dan diastolik, misalnya 120/70, yang berarti tekanan sistolik adalah 120 mmHg dan diastolik 70mmHg. Berbagai kepustakaan menyebutkan kriteria tekanan darah orang dewasa sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tekanan Darah

Sistolik	Diastolik	
<140	< 85	Normal
141 - 159	86 - 99	Hipertensi ringan
160 - 179	100 - 109	Hipertensi sedang
180 - 209	110 - 119	Hipertensi berat
>210	> 120	Hipertensi sangat berat

Sumber : American Heart Association, "Your Heart – an Owner Manual". 1995

- OBESITAS

Obesitas atau kegemukan adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan adanya penumpukan lemak tubuh yang melebihi batas normal. Penumpukan lemak tubuh yang berlebihan dapat terlihat dengan mudah. Akan tetapi perlu disepakati suatu batasan untuk menentukan apakah seseorang dikatakan menderita obesitas atau tidak, yaitu dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badan.

Penyebab Obesitas :

Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya obesitas antara lain :

a. Kelebihan makanan

Obesitas hanya mungkin terjadi jika terdapat kelebihan makanan dalam tubuh, terutama bahan makanan sumber energi. Dengan kata lain, jumlah makanan yang dimakan setiap hari jauh melebihi kebutuhan faal tubuh

b. Kekurangan Aktifitas Fisik dan Kemudahan Hidup

Obesitas dapat juga terjadi bukan karena makan berlebihan, tetapi karena aktifitas fisik berkurang, sehingga terjadi kelebihan energi. Berbagai kemudahan hidup juga menyebabkan berkurangnya aktifitas fisik, dan kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan mendorong masyarakat untuk menempuh kehidupan yang tidak memerlukan kerja fisik yang berat

c. Faktor Psikologis dan Genetik

Faktor genetis juga sering juga disebut sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya obesitas. Gangguan emosional akibat adanya tekanan psikologis atau lingkungan kehidupan masyarakat yang dirasakan tidak menguntungkan, dapat mengubah kepribadian seseorang,

sehingga orang tersebut menjadikan makanan sebagai pelariannya. Sungguhpun tidak dapat dibuktikan adanya faktor genetik yang berpengaruh terhadap obesitas, tetapi tidak jarang ditemukan adanya beberapa penderita obesitas dalam satu keluarga.

- STRES

Stres dianggap merupakan salah satu faktor resiko penyakit jantung meskipun belum dapat “diukur” berapa besar pengaruh tersebut memicu timbulnya penyakit jantung. Mungkin deskripsi yang paling mendekati ialah suatu keadaan mental yang nampak sebagai kegelisahan, Kekhawatiran, tensi tinggi, kesyikan yang abnormal dengan suatu dorongan alau sebab dari lingkungan yang tidak menyenangkan. Jadi Seorang yang mengalami stres dapat mengeluh karena merasa tidak sehat, sakit kepala, berdebar (palpitasi), sakit lambung atau insomnia, tidak bahagia, atau bahkan depresi. Tidak semua simptom tersebut hadir bersama-sama. (Iman Soeharto, 2002).

Derajat stres kronis seperti itu sering terjadi dalam situasi yang merugikan dan negatif di bidang pekerjaan dan dalam lingkungan keluarga. Beberapa studi kepribadian mengungkapkan bahwa kepribadian Tipe A yang ambisius, kemauan keras, mencapai sasaran Super dan mereka umumnya Sulit menjadi puas atau senang ternyata lebih mudah mendapatkan penyakit Jantung koroner daripada kepribadian Tipe B, yang dicontohkan sebagai orang-orang yang lebih mudah merasa beruntung, tidak terlalu ambisius, dan mudah puas. Meskipun sulit untuk mencari korelasi antara faktor stres dan serangan jantung, teristimewa kalau faktor resiko koroner lainnya juga hadir. Stres dapat memicu pengeluaran hormon adrenalin dan katekolamin yang tinggi yang dapat berakibat mempercepat Kekejangan (spasm) arteri koroner, sehingga suplai darah ke otot jantung terganggu.

- SOSIAL EKONOMI

Untuk negara-negara yang berkembang, bersama meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat di kota - kota besar terjadi perubahan pola makan yang banyak mengandung bahan makan lemak jenuh dan kolesterol. Pengetahuan masyarakat masih kurang tentang cara pengaturan makanan yang baik. Adanya kebiasaan makan yang salah merupakan salah satu faktor resiko pada penyakit jantung. (Santoso,T, 1989)

- KETURUNAN

Sejarah keluarga untuk penyakit kardiovaskuler dapat mencerminkan genetis (sifat turunan) dan atau gaya hidup keluarga yang tidak sehat. Jika kebanyakan anggota keluarga anda merokok, kurang bergerak, dan diet miskin nutrisi kebiasaan tersebut sangat berbahaya dan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung di dalam keluarga anda. Bagaimanapun, tidak seperti gen anda, kebiasaan ini dapat diubah. Dengan kata lain, jika keluarga anda memiliki gaya hidup yang sehat, tetapi tingkat insiden si penyakit kardiovaskuler tinggi, kemungkinan besar genetika sedang memainkan peranannya. Dengan melatih gaya hidup yang sehat, anda dapat membantu mengurangi risiko anda daripada anda menyerah dan berpikir tidak dapat mengendalikan nasib anda. (Douglas Wetherill, Ms,2001)

2.6 Patogenesis

Bila jantung dihadapkan pada beban yang berlebihan maka jantung mengadakan kompensasi secara insiniristik untuk meningkatkan kemampuan kerjanya dalam mengatasi beban tersebut sedemikian rupa sehingga vena jantung dapat dipertahankan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh. Mekanisme kompensasi itu adalah

- Dilatasi Vertikal, yaitu : serat otot jantung merenggang agar kontraksi

lebih kuat sehingga menimbulkan stroke volume meningkat.

- Hipertropi miokardium, yaitu: agar kontraksi lebih efektif sehingga cardiac Output meningkat.
- Redistribusi cairan bebas dan elektrolit melalui pengaturan cairan oleh ginjal dan terjadi vasokonstriksi perifer agar volume darah meningkat dan cardiac output meningkat.

Apabila dengan kompensasi tersebut sudah dipergunakan seluruhnya dan sirkulasi darah dalam tubuh belum juga terpenuhi maka terjadilah kegagalan jantung yang disebut dengan Decompensatio Cordis.

Apabila sudah terjadi gagal jantung, maka menyebabkan cardiac output menurun, perfusi renal menurun dan tekanan osmotik meningkat serta peningkatan ADH dan penipisan absorpsi air.

2.7 Patofisiologi

Ditinjau dari penyebabnya, maka patofisiologi terjadinya Decompensatio Cordis adalah sebagai berikut:

- Kegagalan Miokard
Adalah miokard tidak mampu berkontraksi dengan sempurna akibat gangguan kontraktilitas sehingga isi sekuncup (stroke volume) dan cardiac output menurun.
- Beban Tekanan Berlebihan (abnormal pressure overload)
Beban sistolik yang berlebihan menyebabkan hambatan pengosongan ventrikel sehingga curah ventrikel atau isi sekuncup menurun
- Beban Volume Berlebihan
Jika pengisian volume pada waktu diastolik meningkat, melampaui kapasitas ventrikel. Menyebabkan volume dan tekanan akhir diastolik ventrikel meningkat sehingga curah jantung menurun. Penyebab diastolik overload ini, misalnya: Hipervolemia sekunder (gangguan ekskresi cairan)
- Kebutuhan Metabolik Meningkat
Karena kebutuhan metabolik meningkat, merangsang jantung bekerja lebih keras untuk menambah sirkulasi dan bila sudah melampaui daya kerja jantung namun

jantung sudah bekerja maksimal, maka akan terjadi gagal jantung walaupun curah jantung sudah cukup tinggi tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh, ini disebut high output failure.

- Hambatan pengisian jantung bagian ventrikel

Hambatan ini karena adanya gangguan aliran bilik vena sehingga pengeluaran atau output ventrikel berkurang dan curah jantung akan menurun.

Ditinjau dari klasifikasinya, maka secara umum dapat dikemukakan patofisiologi terjadinya Decompensatio Cordis Sinistra adalah sebagai berikut: adanya penurunan cardiac output sehingga volume residu ventrikel kiri meningkat dan tekanan atrium kiri meningkat, sehingga terjadi peningkatan tekanan kapiler paru yang lebih besar dari pada tekanan osmotik koloid, sehingga menimbulkan transudat pada jaringan interstisial dan alveoli serta menimbulkan kekurangan oksigen dalam darah (hipoksia). tetapi jika tekanan alveoli maka timbul gangguan difusi.

Patofisiologi terjadinya Decompensatio Cordis kanan adalah sebagai berikut: Cardiac output menurun sehingga volume residu ventrikel kanan meningkat sehingga tekanan atrium kanan juga meningkat sehingga terjadi kongesti vena pada sirkulasi sistemik.

Decompensatio Cordis yang disebabkan oleh Hipertensi Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan pendorong yang kuat terjadinya penyakit kardiovaskuler. Meskipun fakta menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi dalam jangka waktu lama tidak memberikan keluhan atau komplikasi, namun pada suatu saat mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi Decompensatio Cordis dan gagal ginjal

Kerja jantung terutama ditentukan oleh curah jantung dan tekanan perifer. Curah jantung pada penderita hipertensi umumnya normal, kelainannya terutama pada peninggian tahanan perifer

Kenaikan tahanan perifer ini disebabkan oleh vasokonstriksi arteri akibat naiknya tonus otot polos pembuluh darah tersebut. Bila hal ini berjalan cukup lama maka akan dijumpai perubahan struktural pada pembuluh darah arteri berupa penebalan tunika

intima dan hipertensi pada ventrikel kiri, akhirnya akan berakhir dengan dilatasi pembuluh darah pada ventrikel kiri dan selanjutnya akan menyebabkan Decompensatio Cordis kiri. Pada penderita hipertensi dalam perjalanan penyakitnya dapat terjadi gagal jantung kiri akut disamping terjadinya gagal jantung kongestif.

2.8 Gejala Klinis

Ditinjau dari klinisnya secara Sistematologi, dikenal gambaran klinis berupa gagal jantung kanan, gagal jantung kiri dan gagal jantung kongestif. Tetapi secara fungsional, jantung kanan dan kiri merupakan satu keandalan yang menyatu dalam sirkulasi aliran darah. Berarti jantung bagian kanan dan kiri merupakan dua pompa paralel yang terpisah secara anatomis, tetapi secara fisiologis masih berhubungan dalam satu sistem sirkulasi. Kegagalan satu bagian jantung sebagai pompa, akan menyebabkan gangguan fisiologis pada bagian itu juga. Sehingga gambaran klinisnya kadang-kadang sulit dipisahkan satu sama lainnya secara tegas tetapi akan sering kali dapat dibedakan bagian jantung yang menimbulkan kegagalan dominan.

Gejala klinis pada gagal jantung kanan adalah:

1. Edema pretibial, edema presakral, edema dependent dan ascites serta hidrotorak.
2. Distensi vena jugularis meningkat.
3. Gangguan gastrointestinal, seperti anoreksia, mual, muntah dan rasa kembung
4. Adanya hepa tomegali
5. Gangguan ginjal, seperti: oliguri dan nocturia

Gejala klinis gagal jantung kiri :

1. Dyspnea / dyspnea d'effort, batuk dengan sputum berbusa dan kadang-kadang hemoptu, ortopnea, cheyne stroke, paroksismal nocturnal dyspnea, Siasnosis, kelainan fungsi paru, ronchi basah halus tidak terdengar nyaring basal paru, hidrothoraks dan suara serak
2. Kelainan Jantung, seperti pembesaran jantung. seperti pembesaran jantung

bunyi jantung III, pulsus alternans. gallop, P2 mengeras techikardi

3. Tekanan vena jugularis normal
4. Basal metabolisme rete mungkin meningkat
5. Kelainan toto rontgen, seperti hili membesar, diparu terlihat bayangan garis lebih banyak dari biasanya dan jantung membesar.

2.9 Penatalaksana

Dalam penatalaksana Decompensatio Cordis ini harus memperhatikan prinsi prinsip dasar pengobatan, yaitu:

- Mengobati dan menaggulangi penyebab serta pencetus terjadinya gagal jantung.
 - Pengobatan dengan tindakan operasi untuk memperbaiki kelainan anatomi
 - Pengobatan dengan menghilangkan faktor pencetus, misalnya infeksi.
 - P'engobatan penyebab diluar jantung, misalnya enemia, polisitemia.
- Mengatasi sindroma gagal jantung untuk memperbaiki fungsi miokard Misalnya dengan memberikan obat inotropik positif, yaitu preparat digitalis (digoksin, digitoksin) juga mempunyai efek kronotropik negatif, yaitu menurunkan kecepatan konduksi rangsangan dalam sistem hantaran jantung
- Menurunkan beban hemodinamis jantung. Dengan memberikan obat vasodilator Selain itu juga untuk meningkatkan cardiac output dan menghilangkan bendungan paru sehingga kcluhan berkurang dan beban kerja jantung dapat pulih kembali salah satu kerja obat vasodilator, adalah nitrogliserin.
- Mengatasi retensi cairan dan garam dan dalam tubuh. Misalnya dengan memberikan memberikan preparal dieurctik, misalnya furoscmid. Gunanya untuk menghambat reabsorbsi natrium dan kalum serta mengurangi preload dan tekanan pengisian yang berlebihan. Perlu diperhatikan efek samping obat ini, yaitu: hipokalemia dan hipovolami. Hal ini dapat dicegah dengan pemberian suplai garam kalium, misalnya

- spironolakton, dan memantau keseimbangan cairan tubuh
- Memperbaiki irama jantung
 - Mengatur beban kebutuhan sirkulasi darah, untuk menurunkan beban kerja jantung dengan cara menghilangkan faktor- faktor yang memperberat jantung, misalnya mengurangi kerja fisik, istirahat baring dan diet.
 - Memperbaiki oksigenisasi jaringan tubuh, yaitu
 - posisi semi fowler
 - oksigen, bila frekuensi pernafasan lebih dari 28 kali permenit. Oksigen diberikan 24% - 28 %, kelembapan, kecepatannya 2-3 liter permenit, melalui nasal canucule atau sungkup muka. Obat morpin dapat diberikan untuk mengurangi sesak jika ada edema paru dan asma cardial

Tujuan penatalaksanaan gagal jantung

- A. Menentukan derajat payah jantung
Berdasarkan kebutuhan dan tanda klinik derajat gagal jantung dapat dibedakan
 1. Ringan, sedang, dan berat
 2. Akut atau kronik
 3. Gawat darurat atau tidak
- B. Membatasi aktivitas
Gagal jantung kelas 3 dan 4 istirahat di tempat tidur
Gagal jantung kelas I dan 2 tidak perlu istirahat di tempat tidur
- C. Mengobati faktor pencetus dan sebab penyakit jantung misalnya anemia, infeksi dan perdarahan harus diatasi
- D. Mengatur dan mengurangi garam
- E. Pemberian obat – obatan
 - Dieretika
 - Digoxin
 - Vasodilator

Berdasarkan uraian sebelumnya penatalaksanaan jantung adalah sebagai berikut :

- A. Ringan
 1. Cari etiologi yang dapat diobati dan faktor pencetus
 2. Kurangi aktivitas fisik

3. Jika ada gangguan irama jantung dapat diberikan digoxin loading dose atau langsung maintainance dose
4. Hindarkan makanan yang mengandung garam
5. Bila perlu diberi kan dieuretic ringan

B. Sedang

1. Cari etiologi yang dapat diobati
2. Kurangi aktivitas fisik
3. Berikan dioxin loading dose
4. Berikan deuretik ringan
5. Dapat diberikan venodilator
6. Bila terdapat lesi yang merupakan low output simptom maka di berikan arteridilator
7. Bila ada bendungan maka diberikan balance vasodilator

C. Berat, kronik

1. Cari etiologi dan faktor pencetus
2. Istirahat di tempat tidur tapi tidak boleh lama
3. Batasi garam
4. Beri deuretik kuat
5. Beri digoxin loading dose
6. Vasodilator
7. Oksigen

D. Berat, Akut

1. Tempatkan pada posisi yang baik
2. Oksigen
3. Bila belum pernah dapat digoxin dapat diberi IV 0,75mg
4. Morfin 5 mg IV pelan
5. Dieretik kuat
6. Bila ada atrial fibrilisasi atau ventikuler eksbai stok yang tidak hilang terapi biasa dapat dilakukan DC
7. Nitrogliserin dan aminopylin

2.10 Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan ditujukan pada faktor resiko yang telah diidentifikasi. Lebih baik dari sebatas pengobatan.

Empat tingkat pencegahan yaitu :

1. Pencegahan Premordial: Upaya pencegahan munculnya faktor Predisposisi terhadap penyakit jantung dari suatu wilayah belum tampak adanya faktor yang menjadi resiko penyakit jantung
2. Pencegahan Primer: Upaya pencegahan terhadap berkembangnya proses arteriosklerosis sejak dini, sasaran usia muda.

3. Pencegahan Skunder

- Diagnosis dini : screening, ECG, Rontgen
- Pengobatan
- Perubahan pola hidup
- Menurunkan mortalitas

4. Pencegahan Tersier Upaya pencegahan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat atau kematian.

- Rehabilitasi dan perawatan orang sakit

Gambar 2.2 Bagan aliran darah tubuh manusia

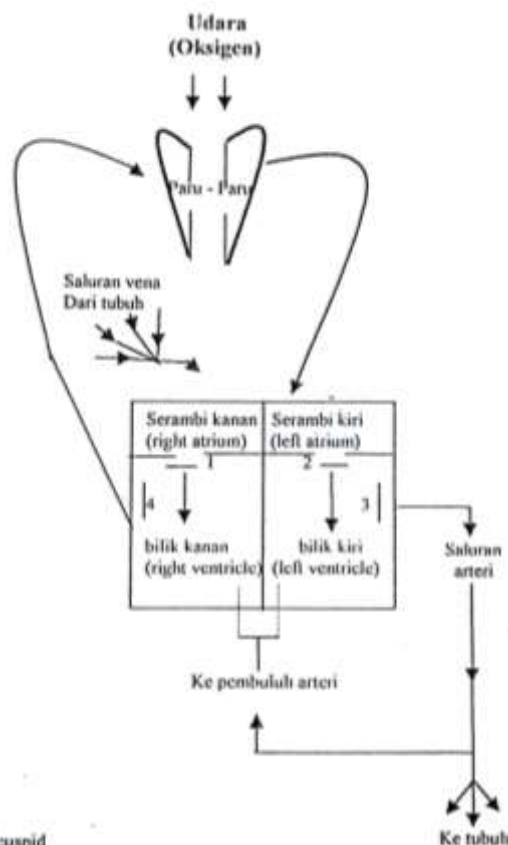
Note :

1. Klep Tricuspid
2. Klep Mitral
3. Klep Aorta
4. Klep Pulmonary

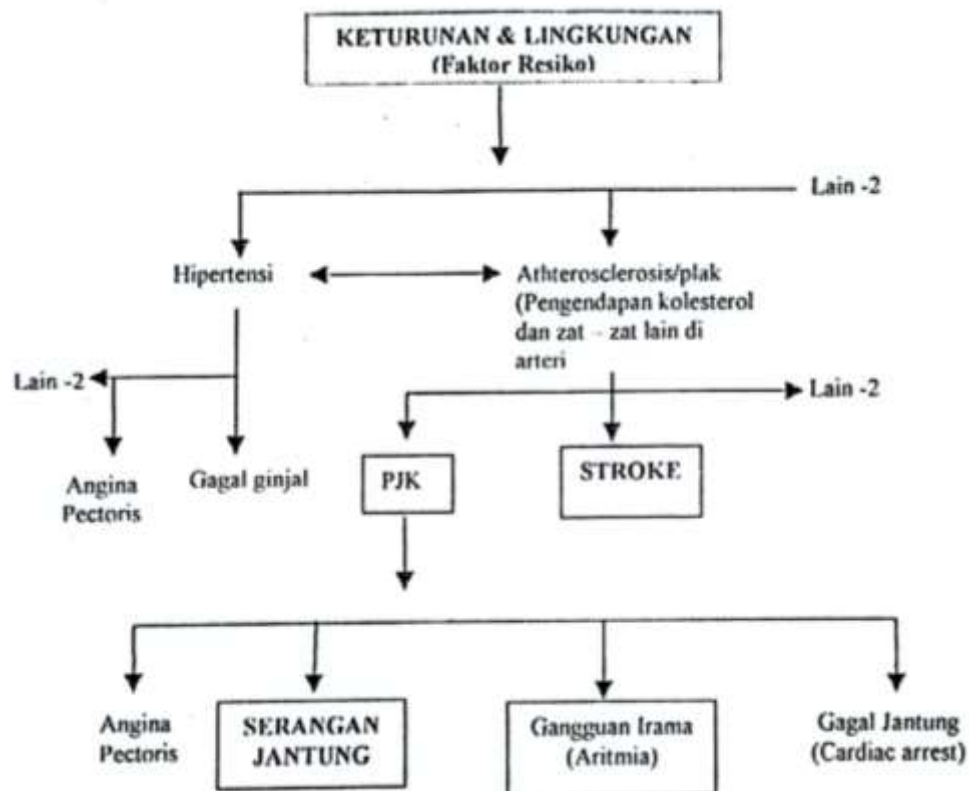
———— Darah kaya
 ————— Darah kurang

Sumber :

Triangganaid



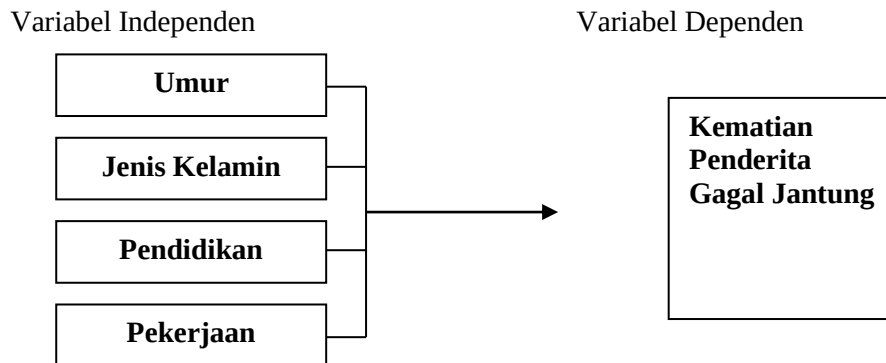
Gambar 2.1 Garis besar sebab dan akibat pengendapan kolesterol dan lemak pada pembuluh arteri



Sumber : Dr. Chandra Patel, "Fighting Heart Disease", 1995

KERANGKA KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL DAN HIPOTENSI

3.1 Kerangka Konsep



.2 Definisi operasional

3.2.1 Variabel Dependen

Kematian penderita gagal jantung: angka / jumlah penderita yang meninggal karena jantung tidak berfungsi secara normal untuk memompakan darah keseluruh tubuh. (Soeparman, Ilmu Penyakit dalam Jilid 1, 1987)

1.2.2 Variabel Independen

a. Umur : masa sejak kelahiran hingga ulang tahun terakhir yang akan dihitung dengan tahun kabisat kalender). (Dauglas witheril, MS, Kegagalan Jantung Kongestif, 2002). Didapatkan dengan wawancara, hasilnya berupa umur dalam tahun. Diukur dengan kuisioner

skala : rasio0..

1. Jenis kelamin: adalah status seksual berdasarkan penampilan fisik. Hasil : perempuan atau laki- laki.

Skala : nominal

- a. Jenis Kelamin : Status seksual berdasarkan penampilan fisik, yaitu laki- laki atau perempuan (Yani M, Kepuasan Pasien Rawat Inap RSU, 1999)
- b. Pendidikan Masa menjalin pendidikan formal, diukur melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner. (Yani M, Kepuasan Pasien Rawat Inap RSU,1999). Hasilnya adalah : tidak tamat SD,

tamat SD, tamat SLTP, SMU, Perguruan Tinggi Diukur dengan kuisioner.

Skala: Ordinal.

- c. Pekerjaan: kegiatan yang dilakukan pasien untuk mencukupi kehidupan keluarga untuk memperoleh pendapatan tetap. (Ziaitmal , *Delivering Quality Services*, 1985) Didapat melalui wawancara dengan memahami kuisioner. Hasilnya adalah: Pedagang/ Pengusaha, Buruh / Tani, Pegawai Swasta, Pegawai Negeri ABRI, dan lain-lain.

Skala: Nominal.

VARIABEL	DEFINISI	CARA UKUR	ALAT UKUR	HASIL UKUR	SKALA
Angka kematian	Jumlah kematian penderit karena jantung tidak berfungsi dengan baik	Wawancara	Kuisisioner		Nominal
Umur	Masa sejak kelahiran hingga ulang tahun terakhir yang akan dihitung dengan tahun kabisat (kalender)	Wawancara	Kuisisioner	15 – 25 Th 25 – 44 Th 45 – 65 Th	Ordinal
Jenis kelamin	Status seksual berdasarkan penampilan fisik	Wawancara	Kuisisioner	Laki – laki Perempuan	Nominal
Pendidikan	- Masa menjalin pendidikan formal -Jenjang pendidikan tertinggi	Wawancara	Kuisisioner	<SD SLTP >SLTA	Ordinal
Pekerjaan	Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan tetap / untuk mencukupi kebutuhannya, keluarga	Wawancara	Kuisisioner	Buruh / Tani PNS / ABRI Pegawai Swasta Pedagang / Pengusaha	Nominal

3.2 Hipotesis

1. Ada hubungan antara umur dengan kematian penderita gagal jantung.
2. Ada hubungan antara jenis kelamin dengan kematian penderita gagal jantung.
3. Ada hubungan antara pendidikan dengan kematian penderita gagal jantung.
4. Ada hubungan antara pekerjaan dengan kematian penderita gagal jantung.

4.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei analitik kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi potong lintang (cross sectional). Cross Sectional yaitu mempelajari hubungan antara variabel dependen dan independen pada saat yang sama.

4.3. Populasi dan Sampel

4.3.1 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita gagal jantung yang ada di rawat jalan dan di ruang rawat inap RSD Kabupaten Musi Rawas. Jumlah penderita Decompensasio Cordis 78 orang

4.3.2 Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh penderita gagal jantung yang ada di ruang rawat inap RSD Kabupaten Musi Rawas, sebanyak 34 orang dengan kriteria :

- Penderita gagal Jantung, prognosa Duruk, Sesak natis memakai oksigen.
- Sudah dirawat selama dua har
- Umur penderita berkisar antara 15 sampai 65 tahun keatas

4.3.3 PerhitunganJumlah Sampet

4.3.4 Dala penelitian ini, Jumlah sanpel dihitung :

Keterangan : a
$$n = \frac{(Z_{1/2a})^2 (P.Q)}{d_2} \quad 5\%$$

Z1/2a

D = derajat presisi : 3%

P = Proporsi pasien rawat jalan yang menderita penyakit jantung 75%

Q = Proposi pasien rawat inap yang menderita penyakit jantung 75%

4.3.4 Cara Pengambilan Sampel

Dengan cara acak stratifikasi (stratified sampling atau stratified random sampling)

Kriteria : Populasinya adalah orang - orang yang sakit jantung yang datang kerumah sakit, sampelnya adalah penderita gagal jantung yang di rawat

di ruang rawat inap RSD Kabupaten Musi Rawas, hidup atau meninggal dunia.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data skunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada penderita.

Data primer terdiri dari :

- a. Identitas keluarga dan penderita
- b. Data mengenai pendidikan
- c. Data mengenai pekerjaan
- d. Data mengenai pengetahuan
- e. Data mengenai umur penderita

2. Data Skunder

Data yang dapat diambil dari hasil pemertksaan dokter, tindakan perawatan, hasil rontgen dan ECG (rekam jantung)

4.5. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

4.5.1 Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan diolah meliputi

a. Coding (Pengkodean)

Coding adalah usaha mengklasifikasi jawaban jawaban atau hasil - hasil yang ada menurut macamnya ke bentuk yang lebih ringkas dengan menggunakan kode -kode

b. Editing (Pengeditan Data)

Editing adalah meneliti kembali apakah isian lembar kuisisioner atau formulir sudah cukup baik yang dapat segera diproses lebih lanjut. Sebaiknya editing langsung dilakukan dilempat pengumpulan data atau lapangan sehingga jika terjadi kesalahan maka upaya pembetulan data dapat segera dilakukan

c. Entry Data (Pemasukan Data)

Data yang telah sesuai dicoding dan dimasukkan ke dalam kode, selanjutnya dimasukkan ke dalam kartu tabulasi

Cleaning Data (Pembersihan Data)

d. Setelah pemasukan data selesai lakukan pengecekan apakah sudah benar benar bebas dari kesalahan

4.5.2 Analisis Data

Data yang dihasilkan dengan mendistribusikan melalui analisis univariat dan analisis bivariat.

a. Analisis Univariat

Data yang dianalisa dengan menampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian

b. Analisis Bivariat

Data hubungan antara pekerjaan, pendidikan, umur, dan pengetahuan dengan tingginya angka kematian penderita gagal jantung dianalisa dengan menggunakan uji statistik chi-square

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		N	%
1	Laki - laki	24	70,59
2	Perempuan	10	29,41
Jumlah		34	100

$$X^2 = \frac{(O-E)^2}{E}$$

Dan apabila didapat jumlah sel dengan nilai expected < 5 lebih dari 20 % maka uji statistiknya harus dikoreksi dengan Uji Yate's (Yate's Correcetion) dengan rumus :

$$x^2 = \frac{((O-E)-0,5)^2}{E}$$

Keterangan

X^2 = Statistik X^2

E = Nilai Harapan

O = Nilai Pengamatan

5.4.1 Analisa Data

5.4.1. Analisa Univariat

5.4.1.1 Variabel Dependen

Distribusi Penderita Gagal Jantung

Tabel diatas menunjukan distribusi penderita gagal jantung dari 34 penderita didapat hasil bahwa penderita hidup sebanyak 29,4% dan 70,6% penderita gagal jantung meninggal dunia.

5.4.1.2 Variabel Independen

1. Umur

Distribusi Penderita Gagal Jantung Menurut Umur Penderita

No	Umur penderita	Jumlah	
		N	%
1	15-25 Th	10	29,41
2	26-44 Th	8	23,53
3	45-64 Th	16	47,06
Jumlah		34	100

Tabel diatas, dapat diketahui bahwa dengan pengelompokan tiga kategori umur penderita gagal jantung = 45 – 64 th (47,06%), kemudian usia 15 – 25 th (29,41) dan 26 – 44 tahun (23,53%).

2. Jenis Kelamin

Distribusi Penderita Gagal Jantung Menurut Jenis Kelamin Penderita.

Jenis kelamin penderita gagal jantung di RSD Kabupaten Musirawas mei 2003 lebih banyak pada laki-laki (70,59%) dan perempuan (29,41%)

3. Pendidikan

Distribusi Penderita Gagal Jantung Menurut Pendidikan Penderita

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		N	%
1	≤ SD	28	82,35
2	SLTP	2	5,88
3	≥ SLTA	4	11,76
Jumlah		34	100

Dari data diatas diketahui tingkat pendidikan penderita dikelompokan 3 kategori yaitu penderita <SD(82,35%), SLTP (5,88%) dan >SMU (11,76%).

4. Pekerjaan

Distribusi Penderita Gagal Jantung Menurut Pekerjaan Penderita

No	Pekerjaan Penderita Gagal Jantung	Jumlah	No
		N	%
1	Buruh / Tani	6	1
2	PNS / ABRI	2	2
3	Pegawai Swasta	6	3
4	Pedagang / Pengusaha	20	4
Jumlah		34	100

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pedagang lebih banyak menderita gagal jantung 58,82%, dibandingkan dengan PNS dan pegawai swasta.

5.4.2. Analisa Bivariat

5.4.2.1. Hubungan antara umur dengan kematian penderita gagal jantung.

Distribusi Hubungan Antara Umur dengan kematian penderita gagal jantung.

No	Umur	Penderita gagal jantung				Jumlah	
		Hidup		Mati		N	%
		n	%	n	%		
1	15-25 %	6	60	4	40	10	100
2	26-44 %	2	25	6	75	8	100
3	45-64%	2	12,50	14	87,50	16	100
Jumlah		10	29,41	24	70,59	34	100

$X^2=10,464$, P Value = 0,001, OR = 15,20, 95%CI=2,423-95,334

Dari data diatas kematian tertinggi (83,33%) pada penderita gagal jantung usia 45-64 th dibandingkan 15-25 (40%) dan 26-44 th (75%).

Dari hasil uji chi square pada $\alpha=0,05$ % diperoleh $\chi^2 > 5,991$, menunjukan H_0 ditolak

artinya ada hubungan antara umur penderita dengan kematian gagal jantung, yaitu : $X^2=23,3$. Karena nilai X^2 hitung $> X^2$ dilihat dari tabel dan P value $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya ada hubungan antara umur dengan kematian penderita gagal jantung.

5.4.2.2. Hubungan Antara Jenis kelamin dengan Kematian penderita gagal jantung

Distribusi hubungan antara jenis kelamin dengan kematian penderita gagal jantung.

No	Umur	Penderita gagal jantung				Jumlah	
		Hidup		Mati		N	%
		n	%	N	%		
1	Laki - laki	4	16,67	20	83,33	24	100
2	Perempuan	6	60	4	40	10	100
Jumlah		10	29,41	24	70,59	34	100

$X^2=6,384$ P Value = 0,012, OR = 0,133, 9% CI=00,25-0,701

Dari data diatas, proporsi penderita gagal jantung yang laki-laki lebih besar tingkat kematiannya yaitu (83,33%) dibandingkan penderita gagal jantung yang perempuan, yaitu (40%).

Dari hasil uji Square pada $\alpha=0,05\%$ diperoleh $\chi^2 > 6,384$, menunjukan H_0 ditolak artinya ada hubungan antara jenis kelamin

dengan kematian gagal jantung, yaitu : $X^2=33,3$. Karena X^2 hitung $> X$ dilihat dari tabel dan P Value $< 0,05$ maka H_0 ditolak artinya laki-laki lebih besar kemungkinan terjadi serangan gagal jantung.

5.4.2.3. Hubungan antara pendidikan dengan tingginya angka kematian penderita gagal jantung.

Distribusi Hubungan Pendidikan dengan Kematian Penderita gagal jantung.

No	Pendidikan	Penderita gagal jantung				Jumlah	
		Hidup		Mati			
		N	%	n	%	N	%
1	≤SD	7	25	21	75	28	100
2	SLTP	1	50	1	50	2	100
3	≥SLTA	2	50	2	50	4	100
Jumlah		10	29,41	24	70,6	34	100

Dari tabel dapat diketahui bahwa penderita gagal jantung lebih banyak terjadi pada mereka yang berpendidikan ≤SD(75%) sebanyak 28 orang.

Dari hasil uji chi square Ho ditolak artinya ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kematian penderita dengan kematian gagal jantung, yaitu : ($X^2=35,56>5,991$).

5.4.2.4. Hubungan antar pekerjaan dengan penderita gagal jantung.

Distribusi Hubungan Pekerjaan dengan Kematian Penderita Gagal Jantung.

No	Pekerjaan	Penderita gagal jantung				Jumlah	
		Hidup		Mati			
		N	%	n	%	n	%
1	<u>Buruh/Tani</u>	2	33,33	4	66,67	6	100
2	PNS/ABRI	1	50	1	50	2	100
3	<u>Pegawai Swasta</u>	2	2	33,33	4	6	100
4	<u>Pedagang / Swasta</u>	5	5	25	15	20	100
Jumlah		10	29,41	29,42	70,59	34	100

Dari tabel diatas penderita gagal jantung yang banyak meninggal dunia adalah mereka yang bekerja sebagai Pedagang / swasta. Sebanyak 15 orang (75%).

Dari hasil uji statistic Ho di tolak karena $x \text{ hitung} > x \text{ tabel} = 26,77 > 5,991$. Artinya ada hubungan antara pekerjaan dengan kematian penderita gagal jantung.

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1. Kematian Penderita Gagal Jantung

Dari 34 penderita gagal jantung yang dianalisis didapatkan kematian penderita Sebanyak 70,6% dengan menggunakan cut off point nilai $x = 33,03$

Gonzales (1967) menyatakan faktor sosiodemografi berhubungan dengan latar belakang pendidikan, umur, Jenis Kelamin, pekerjaan, dan lainnya.

Tingginya angka kematian penderita gagal jantung ini berhubungan erat dengan pengobatan, pelayanan perawatan dan kesadaran pasien untuk memeriksa diri sebelum prognosanya semakin buruk.

6.2. Umur Penderita Gagal Jantung

Umur merupakan salah satu variabel yang berhubungan dengan kematian penderita gagal jantung. Penelitian ini, Aday (1980) menyatakan bahwa karakteristik yang mempengaruhi kematian adalah umur, dimana Usia 45 -63 tahun lebih tinggi / angka kejadiannya, (47,00)

Mellisa (1996) menyatakan bahwa umur pasien tua memiliki kecenderungan terkena Decompensasi lebih besar dan pengharapan yang lebih rendah.

Umur berpengaruh pada resiko terkena penyakit Kardiovaskuler, karena usia menyebabkan perubahan didalam jantung, Kurang keelastisan pembuluh darah arteri. Pada lansia mereka jadi kurang aktif, Berat badan meningkat, pengaruh gaya, hidup berkolesterol dan merokok menyebabkan tekanan darah meningkat (Douglas Witherhill, MS, 2001)

6.3. Jenis Kelamin Penderita Gagal Jantung

Pada penelitian ini, jenis kelamin laki- laki sebanyak 24 orang (70,59%). Lebih tinggi dibandingkan penderita gagal jantung perempuan (29,41%)

Jenis kelamin wanita umumnya lebih rendah dibandingkan penderita laki-laki (Spelgil -Allen, 1980).

Pada penelitian ini didapatkan hal yang konsisten dimana responden wanita lebih rendah dibanding pria tingkat kematiannya dan begitu juga uji statiknya .

Penyakit Jantung bukan monopoli orang laki- laki, perempuanpun dapat terkena pula memang betul laki - laki lebih banyak terkena serangan jantung daripada perempuan dalam usia muda. Penelitian bahwa perempuan sebelum fase menopause memiliki resiko serangan jantung lebih rendah dari laki- laki. Hal ini disebabkan oleh hormon estrogen yang bersifat melindungi. Hormon ini kelihatannya mempunyai pengaruh bagaimana tubuh bekerja menghadapi lemak dan kolesterol sehingga menghasilkan kadar HDL tinggi dan LDL rendah (Iman Soeharto, Penyakit Jantung, 2002).

6.4. Pendidikan Penderita Gagal Jantung

Pendidikan pada banyak penelitian merupakan salah satu variabel yang menentukan. Spelgil, Allen (1980) menyatakan tingkat pendidikan yang tinggi, lebih banyak mendapatkan informasi kesehatan, mereka lebih berpengalaman dalam memperoleh fasilitas kesehatan.

Dari penelitian ini didapatkan hasil yang konsisten dengan teori dan penelitian sebelumnya, terdapat hubungan signifikan antara pendidikan tinggi dan pendidikan rendah terhadap kematian dan kesembuhan, dan biasanya mereka lebih mudah menerima dan tingkat kesadarannya lebih tinggi, untuk segera berobat dan memeriksa diri sebelum penyakitnya bertambah parah.

6.5. Pekerjaan Penderita Gagal Jantung

Pekerjaan penderita sangat menentukan angka kejadian dan kematian penderita gagal jantung. Mereka yang bekerja berat tanpa istirahat yang seimbang tingkat stress yang tinggi dan aktifitas fisik yang berlebihan dapat memacu kerja jantung.

Dari analisa diatas dan uji square menunjukkan mereka yang bekerja berat lebih cenderung terkena Decompensasi lebih besar.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kurangnya pengetahuan penderita dan keluarga tentang penyakit gagal Jantung, bagaimana perawatan fisiknya, mengakibatkan rencana pengobatan dan perawatan cenderung lebih lama tanpa mengalami kemajuan yang berarti.
2. Penderita umumnya berumur 40-65 tahun atau usia produktif.
3. Besarnya hubungan antara pengetahuan, pekerjaan, umur, sosial ekonomi dan pendidikan dengan tingginya angka kematian pada penderita Decompensasio Cordis.
4. Salah satu hal terpenting dari data yang diambil adalah masih rendahnya kesadaran untuk segera berobat sehingga saat datang ke RSD prognosa pasien sudah sangat buruk.

B. SARAN

1. Masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang penyakit gagal jantung ini jadi perlu ditingkatkan perhatian, pendekatan dan perilunya penyuluhan oleh tenaga kesehatan
2. Motivasi penderita, keluarga dan masyarakat untuk menyadari penyakitnya, mau mengontrolkan diri kesehatannya secara teratur, mau segera berobat sebelum penyakit bertambah parah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, K, Chlifford, 1982. *Petunjuk Modern Kepada Kesenatan*. Indonesia Publishing House. Bandung
- Bouwhuizen, M, 1986. *Ilmu Keperawatan*. Edisi Kedua. EGC, Jakarta
- Beck, E, Mary, 1986. *Nutrion and Dietetic For Nourses*. Yayasan Essentia Medica.Jakarta.
- Bustan, 1997. *Epidemiologi Penyakit tidak menular*. Jakarta
- Multi, Bisma, 1997. *Prinsip dan Metode Riset Epidemiologi*. Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret
- Notoatmodjo, Soekidjo, 1993. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Soeharto, Iman, 2002. *Kolesterol dan Serangan Jantung*. PT. Gramedia Pusaka Utama
- Soeparman, 1987. *Ilmu Penyakit Dalam*. Jilid 1. Balai Penerbit FKUI. Jakarta.
- Santoso, T, 1989. *Gagal Jantung, Ikatan Dokler Indonesia*. Jakarta.
- Ovedoff, David, 1955. *Kapita selekta kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta.

TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK RUMAH SAKIT

Yudi Sudihartono, S.P, MSE¹, DR. Hj Sri Utari, S.Pd, SKM, M.Kes²

¹Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sumsel

²Widyaiswara Balai Pelatihan Kesehatan Prov. Sumsel

Email: yudipolhut@yahoo.com utarisri1964@gmail.com

ABSTRAK

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah umumnya berbentuk padat, cair dan gas dan terhasikan dari berbagai macam kegiatan. Sumber limbah sendiri terdiri dari berbagai macam aktifitas dan salah satunya ialah domestik (rumah tangga). Meskipun limbah domestik tidak menyimpan banyak B3 dan bahan pencemar yang terlalu berbahaya lainnya mengingat kegiatan rumah tangga tidak banyak menggunakan B3 dalam jumlah besar serta konsentrasi besar seperti pada kegiatan industri, rumah sakit, dll

Sesuai rumusan masalah yang apa saja pengertian, jenis serta contoh limbah domestik dan bagaimana teknik pengolahan limbah-limbah tersebut agar aman dibuang ke lingkungan? Sedangkan tujuan adalah mengetahui pengertian, jenis, serta contoh dari limbah domestik. Dan untuk Mengetahui teknik pengolahan limbah agar aman untuk dibuang ke lingkungan dan tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. **Metode** analisis dengan cara observasi secara langsung. Limbah domestik meskipun tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan limbah tersebut memiliki dampak masing-masing terhadap lingkungan tergantung jenis bahan limbah, karakteristik, dan seberapa banyak limbah tertampung oleh lingkungan. Pengelolaan limbah padat sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat juga lingkungan, sehingga perlu adanya penanganan khusus untuk limbah-limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, hewan, maupun tumbuhan agar tetap terjaga secara seimbang tidak menimbulkan bahaya bagi ekosistem.

Kata Kunci : Limbah domestik.

A. Latar Belakang

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah umumnya berbentuk padat, cair dan gas dan terhasikan dari berbagai macam kegiatan. Sumber limbah sendiri terdiri dari berbagai macam aktifitas dan salah satunya ialah domestik (rumah tangga). Meskipun limbah domestik tidak menyimpan banyak B3 dan bahan pencemar yang terlalu berbahaya

lainnya mengingat kegiatan rumah tangga tidak banyak menggunakan B3 dalam jumlah besar serta konsentrasi besar seperti pada kegiatan industri, rumah sakit, dll, namun limbah tetap harus dikelola agar tidak menjadi sebab terjadinya kerusakan pada badan tempat terbuangnya limbah. Limbah yang mengandung bahan pencemar akan mengubah kualitas lingkungan, bila lingkungan tersebut tidak mampu memulihkan kondisinya sesuai dengan daya dukung yang ada padanya. Dan apabila dikembalikan ke alam dalam jumlah yang besar dan tidak terkelola dengan baik, limbah ini akan terakumulasi di alam sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Maka demikian dibuatlah tulisan ini guna mengetahui permasalahan serta bagaimana cara pengolahan limbah domestik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja pengertian, jenis serta contoh limbah domestik?
2. Bagaimana teknik pengolahan limbah-limbah tersebut agar aman dibuang ke lingkungan?

C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian, jenis, serta contoh dari limbah domestik.
2. Mengetahui teknik pengolahan limbah agar aman untuk dibuang ke lingkungan dan tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian, Jenis dan Contoh Limbah Domestik

Menurut Tchobanoglous dalam (Suhartono, 2009), Limbah Domestik adalah limbah yang dibuang dari pemukiman penduduk, pasar, dan pertokoan, serta perkantoran yang merupakan sumber utama pencemaran di perairan pantai. Menurut (Kodoatie and Sjarief, 2005), air limbah domestik merupakan air bekas yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk tujuan semula, baik yang mengandung kotoran manusia atau dari aktivitas dapur, kamar mandi, dan cuci dimana kuantitasnya 50-70% dari total rata-rata konsumsi air bersih yaitu sekitar 120-140 liter/orang/hari. Limbah domestik memiliki sebaran areal yang sangat luas dan menyebar sehingga lebih sulit dikendalikan daripada limbah industri dikarenakan berasal dari aktifitas rumah tangga. Limbah domestik sendiri terdapat 2 sumber yaitu organik dan anorganik. Limbah organik yaitu limbah yang mengandung unsur Karbon (C), sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup. Beberapa diantaranya ialah sisa makanan, sayuran, dedaunan, dll. Secara teknis, sebagian orang masih beranggapan bahwa limbah organik hanya berasal dari makhluk hidup/ alami saja dan sifatnya mudah membusuk (Hasibuan, 2016).

Sedangkan limbah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat membusuk/ terurai secara alami oleh mikroorganisme. Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah yang tidak

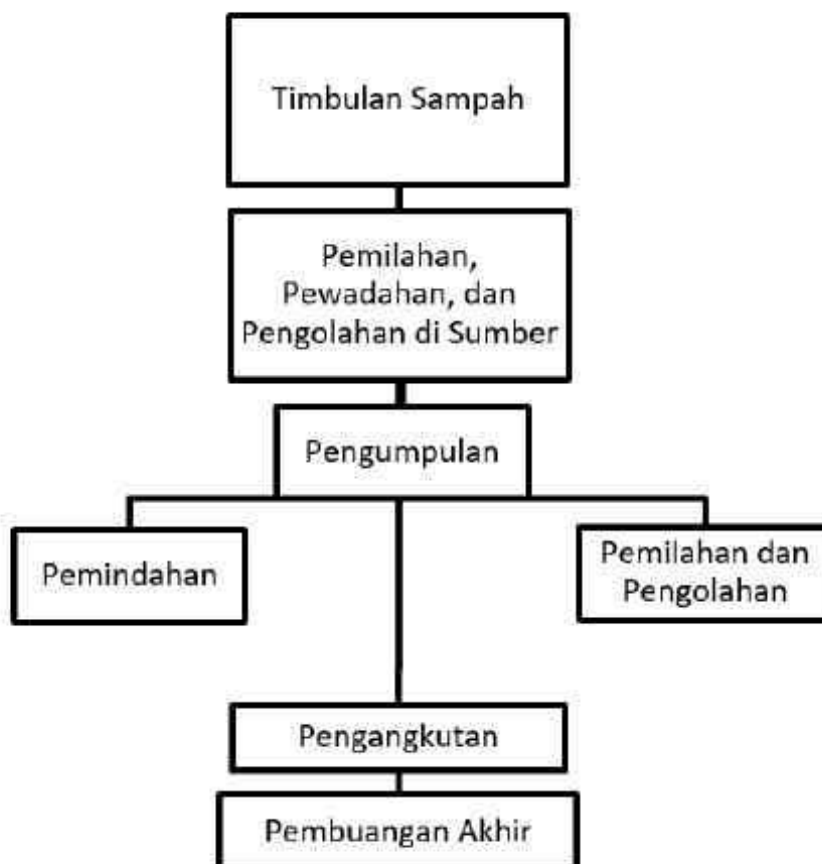
mengandung unsur karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga), kaca dan pupuk anorganik (misalnya yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor) tidak memiliki unsur karbon sehingga tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jenis dari limbah domestik sendiri adalah limbah yang berbentuk padat juga cair. Dari kedua jenis tersebut tentu memiliki teknik pengolahan yang berbeda. Contoh limbah padat domestik diantaranya seperti kertas, alat-alat rumah tangga, sisa sayuran, plastik dsb. Sedangkan limbah cair domestik dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu *grey water* dan *black water*. *Grey water* sendiri terhasikan dari aktifitas mencuci, mandi, dsb. Pada *black water*, terhasikan dari kakus/ aktifitas BAB manusia.

2. Teknik Pengolahan Limbah Domestik

Pengolahan limbah rumah tangga yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Adapun pengolahan limbah rumah tangga yang baik disesuaikan dengan jenis limbah rumah tangga yang dihasilkan.

2.1 Limbah Padat

Berikut skema teknik operasional pengelolaan limbah padat,



- a. **Pewadahan:** penampungan sementara sampah yang dihasilkan di sumber baik individual atau komunal.
- b. **Pengumpulan:** pengumpulan sampah dari wadah-wadah di sumber sampah, dengan berbagai sarana seperti gerobak dan truk.
- c. **Pemindahan:** penampungan sementara sampah sebelum diangkut oleh truk. Sarana yang digunakan dapat berupa sebuah arena pemindaanm atau sebuah wadah besar yang peletakkannya terpusat/tersebar.
- d. **Pengangkutan:** pengangkutan dari lokasi pemindahan ke tempat daur ulang atau ke tempat pengolahan atau ke tempat pemrosesan akhir. Sarana yang digunakan misalnya truk atau kereta.
- e. **Pengolahan:** bertujuan untuk memproses sampah agar berkurang volume atau beratnya, seperti insinerasi, pengomposan, berkurang sifat bahayanya terhadap manusia atau lingkungan, dll.
- f. **Daur ulang:** Kegiatan penanganan sampah, menggnakan cara-cara pengolahan ataupun manual agar sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali.
- g. **Pembuangan akhir:** penyingkiran sampah ke alam lingkungan, seperti ke dalam tanah, lautan, dan sebagainya merupakan alernatif akhir dan tahap akhir yang dilakukan bila dilakukan dengan mengisi tanah atau *landfilling*.

Ada beberapa metode dalam proses pengolahan limbah padat yaitu dengan memakai metode *landfills* (penimbunan), *incineration* (insenerasi), *composting* (pengomposan), *recycling* (daur-ulang), dan solidifikasi dan stabilitas(Astuti et al., 2018).

1.) Penimbunan (*landfills*)

Ada dua cara penimbunan sampah yang umum dikenal, yaitu *open dumping* dan *sanitary landfill*. Pada metode *open dumping*, sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja dalam lubang yang dibuat pada suatu lahan biasanya dilokasi tempat pembuangan akhir (TPA). Metode ini merupakan metode kuno yang sebenarnya tidak memberikan banyak keuntungan. Di lahan penimbunan terbuka, berbagai hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak. Gas metan yang dihasilkan oleh pembusukan sampah organik dapat menyebar ke udara sekitar dan menimbulkan bau busuk serta mudah terbakar. Cairan yang tercampur dengan sampah dapat merembes ke tanah serta air. Bersama rembesan cairan tersebut, dapat terbawa zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh metode *open dumping* menyebabkan dikembangkan metode penimbunan sampah yang lebih baik, yaitu *sanitary landfill*.

Pada metode *sanitary landfill*, sampah ditimbun dalam lubang yang dialasi lapisan lempung dan lembaran plastik untuk mencegah perembesan limbah ke tanah. Sampah yang ditimbun dipadatkan, kemudian ditutupi dengan lapisan tanah tipis setiap hari. Hal ini akan mencegah tersebarnya gas metan yang dapat mencemari udara dan berkembangbiaknya berbagai agen penyebab penyakit. Pada *landfill* yang lebih modern lagi, biasanya dibuat sistem lapisan ganda (plastik-lempung-plastik-lempung) dan pipa-pipa saluran untuk mengumpulkan cairan serta gas metan yang terbentuk dari proses pembusukan sampah. Gas tersebut kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan listrik.

2.) Insinerasi (*inceneration*)

Insinerasi adalah teknologi pengolahan yang melibatkan pembakaran bahan organik. Insinerasi material sampah mengubah sampah menjadi abu, gas sisa hasil pembakaran, partikulat, dan panas. Panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Akan tetapi tidak semua jenis limbah padat dapat diterapkan teknologi ini, karena menghasilkan pencemar udara seraabu hasil pembakaran yang mengansung senyawa berbahaya. Proses insinerasi ada 4 tahapan yaitu proses pre-treatment, proses pembakaran, proses recovery energy, proses penanganan flue gas. Namun sayangnya insinerasi tidak bisa dilakukan oleh sembarang pihak dan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang sudah memiliki izin untuk menggunakan insenerator.

3.) Pengomposan (*composting*)

Kompos adalah pupuk yang dibuat dari sampah organik, seperti sayuran, daun dan ranting, serta kotoran hewan, melalui proses degradasi/penguraian oleh mikroorganisme tertentu. Kompos berguna untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan zat makanan yang diperlukan tumbuhan, sementara mikroba yang ada dalam kompos dapat membantu penyerapan zat makanan yang dibutuhkan tanaman.

Pembuatan kompos merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi timbunan sampah organik. Pembuatan kompos dapat dilakukan dengan menggunakan kompos yang telah jadi, kultur mikroorganisme, atau cacing tanah. Contoh kultur mikroorganisme yang telah banyak dijual dipasaran dan dapat digunakan untuk membuat kompos adalah EM4 (Effective Microorganism 4). EM4 merupakan kultur campuran mikroorganisme yang dapat meningkatkan degradasi limbah/sampah organik, menguntungkan dan bermanfaat bagi kesuburan tanah maupun pertumbuhan dan produksi tanaman, serta ramah lingkungan.

4.) Daur Ulang (*recycling*)

Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 6R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace, Refill, and Repair*). Contoh, beberapa jenis limbah padat yang dapat di daur ulang adalah kertas, kaca, logam (seperti besi, baja, dan aluminium), plastik dan karet.

5.) Solidifikasi dan Stabilitas

Solidifikasi adalah proses pemadatan limbah berbahaya sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat fisik, kimia yang stabil sehingga aman untuk penanganan. Proses selanjutnya mulai pengangkutan, penyimpanan, sementara sampai penyimpanan lestari. Bahan yang dapat digunakan untuk proses solidifikasi adalah semen, semen *fly ash*. Solidifikasi merupakan teknik pengolahan dengan menggunakan pencampuran antara limbah dengan agen solidifikasi. Keuntungan dari metode solidifikasi adalah mencegah disperse partikel kasar dan cairan selama penanganan, meminimalkan keluarnya radionuklida dan bahan berbahaya setelah pembuangan serta mengurangi paparan potensial (pemecahan jangka panjang).

Beberapa properti yang harus diperhatikan dalam solidifikasi antara lain: kemampuan *leaching*, stabilitas kimia, uji kuat tekan, ketahanan radiasi, biodegradasi, stabilitas termal dan kelarutan. Mekanisme solidifikasi dengan menggunakan semen. Selama absorpsi air, senyawa mineral terhidrasi membentuk substansi dispersi koloid yang disebut “sol”. Sol tersebut kemudian di koagulasi dan dipresipitasi (pengondisian akhir). Gel yang terbentuk kemudian dikristalisasi.

2.3 Limbah cair domestik

Limbah cair adalah sisa atau hasil dari suatu kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan apabila sudah terlalu banyak tertampung di lingkungan. Sedangkan pengertian limbah cair menurut (Sugiharto, 1987) air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Limbah cair rumah tangga atau domestik adalah air buangan yang berasal dari penggunaan untuk kebersihan yaitu gabungan limbah dapur, kamar mandi, toilet, cucian, dan sebagainya (Sa'adah and Winarti, 2009).

Pengelolaan limbah cair dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan limbah yang terjadi, volume limbah minimal dengan konsentrasi dan toksisitas yang juga minimal. Meskipun merupakan air sisa, namun volumenya besar, karena kurang lebih 80% dari air yang digunakan bagi kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari tersebut dibuang lagi dalam bentuk yang sudah kotor (tercemar). Selanjutnya air limbah ini akhirnya akan kembali ke sungai dan laut dan akan digunakan oleh manusia lagi. Oleh karena itu, air buangan ini harus dikelola dan atau diolah secara baik. Pengolahan limbah cair domestik akan menghasilkan dua keuntungan, yakni mengatasi masalah pencemaran lingkungan, sekaligus mempromosikan penggunaan limbah cair dari rumah tangga sebagai sumber daya air bersih yang baru bagi masyarakat (Mulyana and Purnaini, 2011).

Proses-proses pengolahan tersebut dapat diaplikasikan secara keseluruhan, berupa kombinasi beberapa proses atau hanya salah satu. Proses pengolahan tersebut juga dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau faktor finansial. Pengelolaan air limbah ada 5 tahap pengelolaan, yaitu pengelolaan primer, sekunder, tersier, desinfeksi dan pengolahan lumpur (Badri, 2013).

1. Pengolahan Primer (*Primary Treatment*)

Tahap pengolahan primer limbah cair sebagian besar adalah berupa proses pengolahan secara fisika.

a. Penyaringan (*Screening*)

Pertama, limbah yang mengalir melalui saluran pembuangan disaring menggunakan jeruji saring. Metode ini disebut penyaringan. Metode penyaringan merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan-bahan padat berukuran besar dari air limbah.

b. Pengolahan Awal (*Pretreatment*)

Kedua, limbah yang telah disaring kemudian disalurkan ke suatu tangki atau bak yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partikel padat teruspensi lain yang berukuran relatif besar. Tangki ini dalam bahasa Inggris disebut grit chamber dan cara kerjanya adalah dengan memperlambat aliran limbah sehingga partikel – partikel pasir jatuh ke dasar tangki sementara air limbah terus dialirkan untuk proses selanjutnya.

c. Pengendapan

Setelah melalui tahap pengolahan awal, limbah cair akan dialirkan ke tangki atau bak pengendapan. Metode pengendapan adalah metode pengolahan utama dan yang paling banyak digunakan pada proses pengolahan primer limbah cair. Di tangki pengendapan, limbah cair didiamkan agar partikel – partikel padat yang

tersuspensi dalam air limbah dapat mengendap ke dasar tangki. Enadapn partikel tersebut akan membentuk lumpur yang kemudian akan dipisahkan dari air limbah ke saluran lain untuk diolah lebih lanjut. Selain metode pengendapan, dikenal juga metode pengapungan (*Floation*).

d. Pengapungan (*Floation*)

Metode ini efektif digunakan untuk menyingkirkan polutan berupa minyak atau lemak. Proses pengapungan dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menghasilkan gelembung- gelembung udara berukuran kecil ($\pm 30 - 120$ mikron). Gelembung udara tersebut akan membawa partikel –partikel minyak dan lemak ke permukaan air limbah sehingga kemudian dapat disingkirkan.

Bila limbah cair hanya mengandung polutan yang telah dapat disingkirkan melalui proses pengolahan primer, maka limbah cair yang telah mengalami proses pengolahan primer tersebut dapat langsung dibuang ke lingkungan (perairan). Namun, bila limbah tersebut juga mengandung polutan yang lain yang sulit dihilangkan melalui proses tersebut, misalnya agen penyebab penyakit atau senyawa organik dan anorganik terlarut, maka limbah tersebut perlu disalurkan ke proses pengolahan selanjutnya.

2. Pengolahan Sekunder (*Secondary Treatment*)

Tahap pengolahan sekunder merupakan proses pengolahan secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai/ mendegradasi bahan organik. Mikroorganisme yang digunakan umumnya adalah bakteri aerob. Terdapat tiga metode pengolahan secara biologis yang umum digunakan yaitu metode penyaringan dengan tetesan (*trickling filter*), metode lumpur aktif (*activated sludge*), dan metode kolam perlakuan (*treatment ponds/lagoons*).

a. Metode *Trickling Filter*

Pada metode ini, bakteri aerob yang digunakan untuk mendegradasi bahan organik melekat dan tumbuh pada suatu lapisan media kasar, biasanya berupa serpihan batu atau plastik, dengan ketebalan $\pm 1 - 3$ m. limbah cair kemudian disemprotkan ke permukaan media dan dibiarkan merembes melewati media tersebut. Selama proses perembesan, bahan organik yang terkandung dalam limbah akan didegradasi oleh bakteri aerob. Setelah merembes sampai ke dasar lapisan media, limbah akan menetes ke suatu wadah penampung dan kemudian disalurkan ke tangki pengendapan.

Dalam tangki pengendapan, limbah kembali mengalami proses pengendapan untuk memisahkan partikel padat tersuspensi dan mikroorganisme dari air limbah.

Endapan yang terbentuk akan mengalami proses pengolahan limbah lebih lanjut, sedangkan air limbah akan dibuang ke lingkungan atau disalurkan ke proses pengolahan selanjutnya jika masih diperlukan.

b. Metode *Activated Sludge*

Pada metode *activated sludge* atau lumpur aktif, limbah cair disalurkan ke sebuah tangki dan didalamnya limbah dicampur dengan lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Proses degradasi berlangsung didalam tangki tersebut selama beberapa jam, dibantu dengan pemberian gelembung udara aerasi (pemberian oksigen). Aerasi dapat mempercepat kerja bakteri dalam mendegradasi limbah. Selanjutnya, limbah disalurkan ke tangki pengendapan untuk mengalami proses pengendapan, sementara lumpur yang mengandung bakteri disalurkan kembali ke tangki aerasi. Seperti pada metode *trickling filter*, limbah yang telah melalui proses ini dapat dibuang ke lingkungan atau diproses lebih lanjut jika masih diperlukan.

c. Metode *Treatment ponds/ Lagoons*

Metode *treatment ponds/lagoons* atau kolam perlakuan merupakan metode yang murah namun prosesnya berlangsung relatif lambat. Pada metode ini, limbah cair ditempatkan dalam kolam-kolam terbuka. Algae yang tumbuh dipermukaan kolam akan berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut kemudian digunakan oleh bakteri aero untuk proses penguraian/degradasi bahan organik dalam limbah. Pada metode ini, terkadang kolam juga diaerasi. Selama proses degradasi di kolam, limbah juga akan mengalami proses pengendapan. Setelah limbah terdegradasi dan terbentuk endapan didasar kolam, air limbah dapat disalurkan untuk dibuang ke lingkungan atau diolah lebih lanjut.

3. Pengolahan Tersier (*Tertiary Treatment*)

Pengolahan tersier dilakukan jika setelah pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair yang dapat berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat. Pengolahan tersier bersifat khusus, artinya pengolahan ini disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa dalam limbah cair / air limbah. Umumnya zat yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui proses pengolahan primer maupun sekunder adalah zat-zat anorganik terlarut, seperti nitrat, fosfat, dan garam-garaman.

Pengolahan tersier sering disebut juga pengolahan lanjutan (*advanced treatment*). Pengolahan ini meliputi berbagai rangkaian proses kimia dan fisika. Contoh metode pengolahan tersier yang dapat digunakan adalah metode saringan pasir, saringan multimedia, *precoal filter*, *microstraining*, *vacum filter*, penyerapan dengan karbon aktif, pengurangan besi dan mangan, dan osmosis bolak-balik.

4. Desinfeksi (*Desinfection*)

Desinfeksi atau pembunuhan kuman bertujuan untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen yang ada dalam limbah cair. Mekanisme desinfeksi dapat secara kimia, yaitu dengan menambahkan senyawa/zat tertentu, atau dengan perlakuan fisik. Dalam menentukan senyawa untuk membunuh mikroorganisme, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Daya racun zat
- b. Waktu kontak yang diperlukan
- c. Efektivitas zat
- d. Kadar dosis yang digunakan
- e. Tidak boleh bersifat toksik terhadap manusia dan hewan
- f. Tahan terhadap air
- g. Biayanya murah

Contoh mekanisme desinfeksi pada limbah cair adalah penambahan klorin (klorinasi), penyinaran dengan ultraviolet (UV), atau dengan ozon (O₃). Proses desinfeksi pada limbah cair biasanya dilakukan setelah proses pengolahan limbah selesai, yaitu setelah pengolahan primer, sekunder atau tersier, sebelum limbah dibuang ke lingkungan.

5. Pengolahan Lumpur (*Sludge Treatment*)

Setiap tahap pengolahan limbah cair, baik primer, sekunder, maupun tersier, akan menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Lumpur tersebut tidak dapat dibuang secara langsung, melainkan perlu diolah lebih lanjut. Endapan lumpur hasil pengolahan limbah biasanya akan diolah dengan cara diurai/dicerna secara aerob (*anaerob digestion*), kemudian disalurkan ke beberapa alternatif, yaitu dibuang ke laut atau ke lahan pembuangan (*landfill*), dijadikan pupuk kompos, atau dibakar (*incinerated*). Untuk teknik pengolahan limbah cair domestik, terdapat 4 teknik pengolahan, diantaranya ialah biofilter, bioball, biofilm, dan kiambang.

1.) Biofilter

Proses biofilter ini dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor biologis yang telah diisi dengan media penyangga untuk pengembangbiakan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi. Untuk proses anaerobik dilakukan tanpa pemberian udara atau oksigen. Biofilter yang baik menggunakan prinsip biofiltrasi yang memiliki struktur menyerupai saringan dan tersusun dari tumpukan media penyangga yang disusun baik secara teratur maupun acak di dalam suatu biofilter. Adapun fungsi dari media penyangga yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya bakteri yang akan melapisi permukaan media

membentuk lapisan massa yang tipis (biofilm)(Herlambang and Marsidi, 2003).

2.) Bioball

Media bioball mempunyai keunggulan antara lain mempunyai luas spesifik yang cukup besar, pemasangannya mudah (random), sehingga untuk paket instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kecil sangat sesuai. Keunggulan dari media bioball yaitu karena ringan, mudah dicuci ulang, dan memiliki luas permukaan spesifik yang paling besar di bandingkan dengan jenis media biofilter lainnya, yaitu sebesar $200 - 240 \text{ m}^2/\text{m}^3$. Sedangkan jenis bioball yang dipilih adalah yang berbentuk bola dengan diameter 3 cm karena bioball jenis ini yang memiliki diameter paling kecil dan dengan bentuknya yang seperti bola (*random packing*) dapat meminimalkan terjadinya *clogging* (tersumbat). Bioball ini berfungsi sebagai tempat hidup bakteri–bakteri yang diperlukan untuk menjaga kualitas air(Said, 2011).

3.) Biofilm

Biofilm adalah kumpulan sel mikroorganisme, khususnya bakteri yang melekat di suatu permukaan dan diselimuti oleh pelekat karbohidrat yang dikeluarkan oleh bakteri. Biofilm terbentuk karena mikroorganisme cenderung menciptakan lingkungan mikro dan relung) mereka sendiri. Biofilm memerangkap nutrisi untuk pertumbuhan populasi mikroorganisme dan membantu mencegah lepasnya sel-sel dari permukaan pada sistem yang mengalir.

Apabila pada media terbentuk lapisan lendir yang berwarna hitam kecoklatan-coklatan serta tidak mudah terlepas dari media, maka dapat dipastikan bahwa telah tumbuh mikroorganisme pada media. Sampai mikroorganisme tumbuh diperlukan waktu selama 2 minggu. Hal tersebut dilakukan untuk didapatkan hasil sampai terjadi steady state pada kondisi air limbah (Herlambang, 2002).

4.) Kiambang

Kiambang (*Salvinia Molesta*) merupakan sejenis tumbuhan air yang mudah dikenali dan sering ditemui. Habitatnya hampir sama dengan teratai, hidup segar di kawasan berair seperti kolam, danau dan paya-paya air tawar. Agak berbeda dengan teratai, kiambang sejenis tumbuhan merayap atau mengapung di atas permukaan air dan cepat berkembang biak. Kiambang memiliki potensi untuk menjernihkan air limbah rumah tangga secara alami, tetapi air tersebut masih belum aman di konsumsi. Selain itu, dapat mengurangi polusi air sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk dan bakteri penular penyakit(Filliazati, 2013).

E. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Null (H_0)

- a. Tidak ada hubungan teknik pengolahan limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan di Rumah Sakit.
- b. Tidak ada pengaruh teknik pengolahan limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan di Rumah Sakit.
- b. Tidak ada pengaruh teknik pengolahan limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan di Rumah Sakit.

2. Hipotesis Kerja (H_k)

- a. Ada pengaruh teknik pengolahan limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan di Rumah Sakit.
- b. Ada pengaruh teknik pengolahan limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan di Rumah Sakit.
- c. Ada pengaruh teknik pengolahan limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan di Rumah Sakit .

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Limbah domestik meskipun tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan limbah tersebut memiliki dampak masing-masing terhadap lingkungan tergantung jenis bahan limbah, karakteristik, dan seberapa banyak limbah tertampung oleh lingkungan. Pengelolaan limbah padat sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat juga lingkungan, sehingga perlu adanya penanganan khusus untuk limbah-limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, hewan, maupun tumbuhan agar tetap terjaga secara seimbang tidak menimbulkan bahaya bagi ekosistem. Limbah cair pun akan mengakibatkan tercemarnya badan air apabila tidak dikelola terlebih dahulu. Masing-masing limbah memiliki cara pengelolaannya tersendiri agar aman untuk dibuang/dibebaskan/dilepas ke lingkungan tergantung dari bagaimana jenisnya.

Limbah padat domestik umumnya menggunakan prinsip 6R. Namun ada 5 metode proses pengolahan limbah padat yaitu dengan memakai metode *landfills* (penimbunan), *incineration* (insenerasi), *composting* (pengomposan), *recycling* (daur-ulang), dan solidifikasi dan stabilitas. Sedangkan pada teknik pengolahan limbah cair domestik, terdapat 4 teknik pengolahan, diantaranya ialah biofilter, bioball, biofilm, dan kiambang.

2. Saran

Dengan terhasilnya limbah dan melihat telah banyaknya limbah yang tertumpuk dan ditampung oleh lingkungan yang nantinya akan berdampak kepada kesehatan lingkungan/ekosistem kehidupan, diharapkan untuk mengelola limbah secara sederhana dimulai

dari pengelolaan sampah/limbah rumah tangga guna meminimalisir tertumpuknya limbah dan mengurangi setidaknya sedikit beban lingkungan dalam menampung limbah terutama limbah yang sulit terurai dan limbah yang memiliki bahan berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. S., Diyani, R. S. & Permadi, R. 2018. Teknologi Pengelolaan Limbah Padat. Dari: <https://www.academia.edu/38608822/MAKALAH TEKNOLOGI PENGELOLAAN LIMBAH PADAT> [Diakses 30 November 2019].
- Badri, M. S. 2013. Makalah Ipa (Tentang Pengelolaan Limbah Cair). Dari: <http://sulhanrengkoz.blogspot.com/2013/04/contoh-makalah-mengenai-pengelolaan.html> [Diakses 30 November 2019].
- Filliazati, M. 2013. Pengolahan Limbah Cair Domestik Dengan Biofilter Aerob Menggunakan Media Bioball Dan Tanaman Kiambang. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 1.
- Hasibuan, R. 2016. Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4, 42-52.
- Herlambang, A. 2002. Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu. *Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan (BPPT) dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Samarinda. Kalimantan Tengah (In Indonesian)*.
- Herlambang, A. & Marsidi, R. 2003. Proses Denitrifikasi Dengan Sistem Biofilter Untuk Pengolahan Air Limbah Yang Mengandung Nitrat. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 4.
- Kodoatie, R. J. & Sjarief, R. 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Andi.
- Mulyana, Y. & Purnaini, R. 2011. Pengolahan Limbah Cair Domestik Untuk Penggunaan Ulang (Water Reuse). *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 1.
- Sa'adah, N. R. & Winarti, P. 2009. Pengolahan Limbah Cair Domestik Menggunakan Lumpur Aktif Proses Anaerob. *Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang*.
- Said, N. I. 2011. Aplikasi Bio-Ball Untuk Media Biofilter Studi Kasus Pengolahan Air Limbah Pencucian Jean. *Jurnal Air Indonesia*, 1.
- Sugiharto 1987. *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*, Jakarta, UI Press.
- Suhartono, E. 2009. Identifikasi Kualitas Perairan Pantai Akibat Limbah Domestik Pada Monsun Timur Dengan Metode Indeks Pencemaran (Studi Kasus Di Jakarta, Semarang, Dan Jepara). *Wahana Teknik Sipil*, 14, 51-62.

“ Program Pelaksanaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”

Mudasir

Widyaiswara Utama BPSDMD Provinsi Sumsel

Email: palembangimuda@yahoo.co.id, HP: 081367728344

Diterima: 1 Oktober 2022, Disetujui: 21 November 2022

ABSTRAK

Program pelaksanaan kapasitas sumber daya aparatur pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, ini memfokuskan penelitiannya pada Evaluasi Pelaksanaan Program Diklat yang meliputi perencanaan diklat yang pernah diikuti pegawai, pelaksanaan pendidikan formal hingga evaluasi pelaksanaan yang berupa tingkat ketercapaian tujuan. Data dianalisis dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, telah berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain: sebagian peserta masih menganggap bahwa mengikuti diklat hanya sebagai persyaratan untuk menduduki suatu jabatan tertentu, sehingga tidak serius dalam mengikuti kegiatan selama diklat berlangsung; masih terdapat ketidakseimbangan pengajar/instruktur yang relevan. Hal ini tampak dari komposisi instruktur yang ada dalam penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan serta masih adanya widyaiswara yang belum sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya dalam mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi (globalisasi) serta belum efektif dalam menggunakan metode pembelajaran; dana untuk penyelenggaraan kediklatan belum maksimal, peningkatan Kualitas diklatan serta pelayanan dan administrasi diklat yang diberikan oleh penyelenggara diklat masih kurang memuaskan, karena penyelenggara lamban dalam memberikan pelayanan maupun kurangnya koordinasi dengan panitia diklat lainnya, seperti dalam hal pembagian modul maupun materi pembelajaran lainnya.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemerintahan di lingkungan Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan, adalah dilihat dari keberhasilan para peserta dalam Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mengikuti kegiatan diklat. Para peserta memperoleh predikat sangat memuaskan dan memuaskan sehingga dinyatakan lulus dalam mengikuti Diklat Pemerintahan. Dalam hal ini, peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan (STTP) dan sertifikat sebagai bukti bahwa peserta telah memiliki kompetensi sebagai pegawai untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kata Kunci : Evaluasi, Pendidikan dan Pelayanan

A. Latar Belakang

Sumber Daya Aparatur merupakan hal yang teramat penting pada sebuah instansi pemerintah dan selalu menjadi sorotan dunia kerja, maka dari itu Sumber Daya Aparatur daerah bukanlah hal yang baru dalam kebijakan dan praktek pemerintah di Indonesia. Sejak tahun 1945 telah dibuat peraturan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yaitu ketika ditetapkannya Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas undang-undang UU No. 08 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara 3041). Lahirnya Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, tambahan Negara Nomor 3851), bukan saja mengulangi kembali ketentuan mengenai birokrasi pada pemerintahan daerah, tetapi juga menyangkut mekanisme hubungannya dengan manajemen sumber daya aparatur.

Penerapan asas desentralisasi dan dekonsentrasi diharapkan dapat memaksimalkan peran aparatur pemerintah daerah. Tentu saja untuk merombak sistem yang ada sangat sulit dan diperlukan langkah-langkah strategis termasuk untuk mereformasi para aparaturnya sebagai salah satu upaya reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas dan keberdayaan birokrasi itu sendiri.

Dampak positif dari reformasi, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan yaitu telah terjadi pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik. Hal ini ditandai dengan memberikan keluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat itu sendiri, sesuai dengan kondisi dan wilayahnya.

Konsekuensi logis dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekaligus menjawab tuntutan reformasi adalah penyiapan sumber daya manusia yang ada di daerah, terutama aparat pemerintah daerah, untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan-perubahan pada masyarakat. Selain itu banyak terlihat kelemahan dan kekurangan di institusi penyelenggara Negara. Mungkin seperti etos kerja dan disiplin para pegawai masih perlu ditingkatkan, tantangan yang masih banyak perlu dihadapi dan direspon secara positif, oleh karena itu memerlukan penyelesaian sikap mental.

Tuntutan *good governance* menurut Featherstone, 1990 (dalam Wahab, 1999:1) dewasa ini telah mulai menggema diseluruh dunia termasuk Indonesia ditandai bangkitnya masyarakat diseluruh penjuru dunia (termasuk Negara dunia ketiga) adalah akibat dari proses globalisasi di bidang politik, ekonomi dan teknologi. Untuk mencapai *good governance* dibutuhkan lebih banyak aparat pemerintah yang profesional yang menguasai teknik-teknik manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Seperti yang diungkapkan oleh Lane (dalam Islamy, 1998:10) "*Rules may be handled by administrative personal whereas goals must be accomplished by professionals*" Oleh karena itu organisasi pemerintah sekarang membutuhkan lebih banyak aparat-aparat profesional yang dapat menangani tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan keahliannya.

Banyak hal yang mestinya dilakukan oleh suatu pemerintah agar mampu mewujudkan suatu pemerintahan yang memiliki kredibilitas tinggi. Sehingga dalam konteks ini pengembangan aparat menjadi hal yang penting. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan rendahnya inisiatif, disiplin dan produktivitas aparat pada hal fenomena ini semua menjadi salah satu penyebab lahirnya ekonomi biaya tinggi (*highcost ecominic*), secara makro dan mikro hal ini akan berdampak terhadap ketidak efisienan dan menimbulkan iklim yang tidak kondusif dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat (Islamy, 1998:10).

Peningkatan sumber daya aparat yang menjadi pertimbangan utamanya adalah manusia,

baik dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Oleh karena itu, peran aparat dalam melaksanakan otonomi daerah sangatlah menentukan, kondisi sekarang merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi ketidaksiapan atau ketidak mampuan (*Capacity Building*), yaitu serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan kepada pengembangan dimensi sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan guna memberikan hasil (Grindle, 1997:5).

Otonomi daerah sebagai wujud nyata dari azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan melahirkan beberapa harapan, baik harapan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun harapan pelayanan pada masyarakat. Berbagai bentuk pelayanan publik tidak ada alasan yang cukup menyakitkan harus dikendalikan lewat mekanisme politik birokrasi dan monopoli. Disini peran pemerintah daerah diharapkan lebih selektif, memiliki mitra gandeng (*cunterpart*) mampu bersaing dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru.

Kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Undang-undang tentang otonomi daerah yang dalam arti luas disebut dengan desentralisasi dan Penerapan Peraturan Pemerintah tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil menghendaki diadakan pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparat baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini wajib dilakukan karena dimasa depan diharapkan adanya peningkatan kemampuan aparat untuk menciptakan organisasi yang lebih baik dan pengolahannya lebih produktif.

Adanya sistem desentralisasi diharapkan dapat menyingkat dan mengurangi hambatan dalam saluran birokrasi dan komunikasi antara pelaksana operasional dengan perencanaan nasional ditingkat pusat. Bahkan desentralisasi sering diakui sebagai cara mengolah pembangunan ekonomi nasional lebih efisien, secara teoritis desentralisasi memberikan wewenang diskresi yang lebih luas kepada "manajer" di tingkat lokal sehingga dapat memutuskan rantai hierarki yang panjang. Sehingga pada dasarnya tujuan pemberian otonomi melalui proses desentralisasi adalah suatu cara menciptakan mobilitas dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintahan itu sendiri.

Selain unsur manusia atau aparturnya sebagai subjek, banyak pula pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, baik dari sisi konstitusi, politik, sosiologi, ekonomi, hukum, dan yang terpenting adalah upaya dalam pelaksanaannya. Tersedianya aparat pemerintah (birokrasi) meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi. Oleh karena itu peningkatan

kualitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah merupakan investasi masa kini atau sekarang guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perlu juga dilandasi pada prinsip-prinsip manajemen terpadu (Islamy, 1998:9-12) agar proses, produk dan mutu pelayanan yang diberikan juga meningkat, yang meliputi:

1. Adanya kepentingan dan dukungan yang tinggi dari pimpinan puncak organisasi
2. Perlunya perencanaan strategis
3. Memusatkan perhatian pada masyarakat
4. Komitmen yang tinggi pada pentingnya kerja kolompok
5. Pengukuran dan analisa proses dan produk hasil
6. Adanya jaminan pada proses, produk dan pelayanan yang bermutu

Peningkatan kualitas dan profesionalisme tidak hanya diinginkan oleh Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah sebagai organisasi publik yang berperan besar dalam era otonomi daerah juga

mengupayakan berbagai kegiatan dan program yang mampu meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, hal tersebut juga dilakukan oleh organisasi dan lembaga teknis daerah dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai beberapa program pembangunan yang salah satunya berupa program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tersebut dilakukan mengingat masih rendahnya kemampuan aparatur yang ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun keadaan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/SMA	4
2	Sarjana Muda / Diploma III	-
3	Strata 1 (SI)	9
4	Strata 2 (S2)	1
Jumlah		14

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. MUBA

Dilihat dari tabel tersebut jumlah pegawai yang tergolong rata-rata berpendidikan sarjana, walaupun masih ada pegawai yang masih berpendidikan SMA/SLTA. Dari fenomena yang ada, sumber daya aparatur di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tergolong sudah mencukupi dalam segi kuantitasnya, namun jika dilihat dari segi kualitasnya masih sangat minim. Beberapa permasalahan yang ada pada pemerintah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.
- b. Masih rendahnya koordinasi secara internal dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana program atau kegiatan untuk setiap sub bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Kurangnya pemahaman pegawai mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian.

- d. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Melihat fenomena dan permasalahan tersebut maka penulis ingin mengadakan evaluasi mengenai proses pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan menuliskannya dalam bentuk tesis dengan judul yaitu **“Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”** sehingga diharapkan dengan adanya evaluasi tersebut dapat diketahui apakah pelaksanaan program tersebut sesuai dengan standar perencanaan sebelumnya, serta sasaran yang diinginkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan diketahui faktor-faktor yang menjadi kendalanya.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diambil suatu alasan yang menyebabkan mengapa masalah sumber daya aparatur menjadi menarik untuk diteliti, karena :

- a. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.
- b. Masih rendahnya koordinasi secara internal dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana program atau kegiatan untuk setiap sub bagian yang ada di Bagian Hukum.
- c. Kurangnya pemahaman pegawai mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian.
- d. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana keberhasilan program peningkatan sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberhasilan program peningkatan sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Landasan Teori

I. Evaluasi

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur jalannya sesuatu yang telah dikerjakan. Menurut Malcom dan Provus evaluasi adalah “perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada

selisih”. Sedangkan menurut *Joint Committee* evaluasi adalah “penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna suatu objek” (Tayibnapis,2004:4).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Worthen dan Sanders dalam Arikunto (2004:1) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan dalam kajian ini sangat luas, termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan

Menurut Arikunto (2004:3), program yang berkaitan dengan evaluasi diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut William N. Dunn (dalam Nugroho, 2003:185) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*, dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan.

Sondang P. Siagian mengemukakan definisi evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kegiatan operasional yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 1987:78).

Definisi evaluasi menurut Firman Aji, adalah :

“Evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil-hasil evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan kembali (Aji, 1984:30).”

Bryant and White (1987:191) misalnya mendefinisikan evaluasi sebagai upaya untuk membuat dokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab-akibat itu dan dengan demikian pemikiran ke depan mengenai evaluasi adalah upaya mengetahui hubungan sebab dan akibat itu berjalan secara sungguh-sungguh.

Casley dan Kumar seperti dikutip Wahab (1997:23) menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran tertentu. Unsur-unsur bagi hasilnya pelaksanaan ialah kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam *policy delivery* haruslah dispesifikasi dan output yang diharapkan dilakukan identifikasi

sehingga evaluasi suatu program tidak hanya terfokus pada tujuan awal. Tetapi dalam evaluasi harus dibedakan antara kegagalan atau *policy failure*.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah usaha untuk mengukur atau memberikan nilai secara objektif terhadap hasil-hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan tersebut, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi *post* tindakan, yaitu lebih kepada proses perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya telah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.

James Anderson menyatakan bahwa ada tiga tipe dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu:

- Evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.
- Evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya kebijakan.

- Evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauhmana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan dapat atau telah dicapai (dalam Nugroho, 2003).

Menurut Sugiyono (2004:10), penelitian evaluasi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

- Penelitian evaluasi formatif yang menekankan pada proses
- Penelitian evaluasi sumatif yang menekankan pada produk

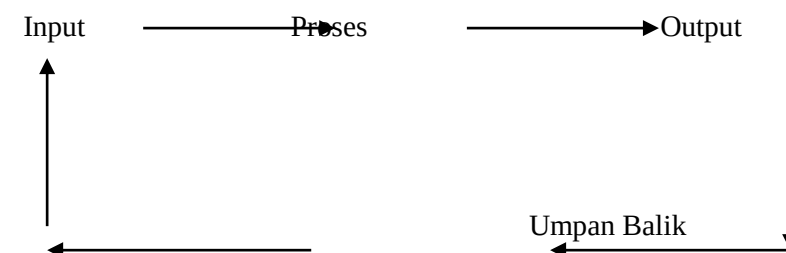
Evaluasi formatif ingin mendapatkan *feedback* dari suatu aktifitas dalam proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan program/produk, sedangkan evaluasi sumatif menekankan pada efektivitas pencapaian program yang berupa produk tertentu.

Evaluasi pada dasarnya adalah untuk mengukur bagaimana proses implementasi dari program dan proyek yang berlangsung, sekalipun yang dilihat adalah prosesnya, namun evaluasi ini tidak terlepas dari kerangka berpikir input-output. Sehingga dalam mengevaluasi tetap dilihat yang menjadi input dari proyek dan apa outputnya.

Berikut gambar kerangka berpikir input-output proyek

Gambar 1

Kerangka berpikir input-proses-output proyek



Sumber : Model Konseptual Sistem Manajemen, 1991.

Input, dalam suatu sistem merupakan komponen tahap awal yang menjadi masukan dalam suatu sistem. Komponen input akan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam proses suatu sistem. Masukan (input) mewakili semua faktor yang ditanamkan dalam suatu organisasi oleh lingkungan ekstern. Masalah ini diolah atau diubah menjadi macam-macam keluaran yang dikembalikan kepada lingkungan-nya.

Proses, merupakan suatu proses pengerahan semua faktor yang terdapat didalam masukkan atau input sehingga dapat diberdayakan atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Sebagai suatu proses, didalamnya terdapat tahapan-tahapan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan berkelanjutan. Secara nyata pada proses transformasional semua kegiatan harus dilaksanakan dalam suatu kerangka manajemen yang secara integrative menjadi acuan dan memberikan gambaran yang jelas tentang semua aspek.

Output, merupakan hasil pelaksanaan kebijakan seperti yang telah ditetapkan pada tujuan sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaksanaan kebijakan tersebut yang berupa kriteria tertentu. Hasil dari output tersebut akan dilihat dan

dibandingkan dengan program yang sudah ditentukan.

Umpan balik, atau disebut juga *feedback* adalah komponen sistem yang berfungsi sebagai reaksi atau respon yang terjadi yang disebabkan oleh pelaksanaan suatu kebijakan, kedudukan umpan balik berfungsi sebagai aspek evaluasi pelaksanaan suatu kebijakan yang bertujuan sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi, yang memakai kerangka berpikir input-output.

Gordon dan Morse (dalam Wibawa, 1994:102) mengemukakan bahwa kriteria metodologis yang minimal harus dipenuhi oleh setiap studi evaluasi dan harus mengatakan bahwa suatu evaluasi harus:

- a. memiliki sasaran kajian yang khusus atau secara operasional mendefinisikan setidaknya-tidaknya salah satu variabel independen dan dependen
- b. mempunyai kelompok kontrol atau desain sampling dan
- c. sebisa mungkin menerapkan tes signifikasi atau mengukur kekuatan hubungan.

Menurut Parson (1995:547), analisis evaluasi memiliki sejumlah pendekatan-pendekatan dan teknik antara lain tentang pengukuran pelaksanaan, hubungan kerugian dan keuntungan. Hal ini dipertegas lagi Polumbu dalam Parson (1995:547) dalam memahami peran teknik-teknik dengan menggunakan lingkaran kebijakan pada informasi.

- a. *Evaluasi Formatif*, Evaluasi yang berlangsung saat kebijakan atau program sedang dilakukan melibatkan analisis dari tingkat dimana program sedang dilaksanakan dan kondisi yang meningkatkan pelaksanaan kebijakan
- b. *Evaluasi Sumatif*. Pada fase lingkaran kebijakan (pengaruh kuat Polumbu berikutnya, informasi evaluasi merupakan penyajian akhir atau sumatif, yaitu mencoba mengukur bagaimana program/kebijakan mempengaruhi masalah-masalah yang dialamatkan.

Teknik-teknik serta metode evaluasi yang digunakan dalam telaah evaluasi seperti kebijakan umum yang lainnya. Sebutan dasar teknik evaluatif menurut Parson (1995:336) adalah memungkinkan untuk mendapatkan pengukuran-pengukuran performa dengan cara yang obyektif setelah data-data digunakan untuk merencanakan, memonitor, mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi.

2. Sumber Daya Aparatur

S.P. Siagian (dalam Pestaria M, 1994 : 10), merumuskan Sumber Daya insani adalah modal dan kekayaan terpenting dari setiap organisasi. Sebagai modal dan kekayaan yang terpenting, unsur manusia dalam organisasi mutlak perlu ditangani secara yang demikian telitinya sehingga segala kemampuan, waktu dan tenaganya benar-benar dapat

dimanfaatkan secara konstruktif, tidak hanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan tetapi dalam rangka pemenuhan berbagai keperluan manusia itu sebagai insan yang terhormat.

Selanjutnya aparatur dalam hal ini merupakan manusia penggerak atau yang melakukan aktivitas. Aris Toteles menguraikan bahwa manusia adalah "*zoon politikon*", dimana Hans Kelsen mengartikan sebagai *man is social and political* atau manusia adalah makhluk sosial yang selalu dijumpai berorganisasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal ini aparatur memiliki tugas dan tanggung jawab mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk pencapaian tujuan organisasi membutuhkan kualitas dari aparturnya. Aparatur yang dibutuhkan adalah aparatur yang handal yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas yang dibebankan padanya.

Aparatur yang berdaya dan yang tangguh menurut Bryson (dalam Abdul Wahab, 1999: 19) adalah aparatur yang memiliki QWL yang tinggi, yang berorientasi kepada:

1. *Participation in decision making*;
2. *Career development program*;
3. *Leadership style*;
4. *The degress of street experienced by employees*;
5. *The Culture of the organization*.

Karena itu, dalam menjalankan roda administrasi pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan pada umumnya, pemerintah dituntut untuk berbenah diri, mendinamiskan dirinya menjadi sebuah pemerintah yang efisien, disemangati oleh jiwa kewiraswastaan atau *enterpreneural goverment*.

Tidak berlebihan jika aparatur Pemerintah Daerah harus memiliki semangat kewiraswastaan. Karena semangat kewiraswastaan menurut Slever, (dalam Wahab,1999) mengandung arti "*an adaptive appportunisstic, and individualistic response to the chaos and fragmenttations of post progressive public administration*"

Begitu juga dengan pakar manajemen modern yaitu Drucker, 1985 (dalam Wahab, 1999: 9) merumuskan jiwa kewiraswastaan itu sebagai "*Spotting opportunities and marshalling resources to produce innovation*"

Sejalan dengan itu, untuk menjadikan aparatur pemerintah daerah memiliki jiwa kewiraswastaan sangat penting untuk dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satu dengan cara "*Reinventing Goverment*" yaitu memandang fungsi dan tugas pemerintah dengan paradigma baru.

3. Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian mengenai evaluasi dan

sumber daya aparatur maka evaluasi program peningkatan sumber daya aparatur merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melihat keberhasilan program yang telah dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

- a. *Input* meliputi:
 1. Sumber Daya Manusia
 2. Sumber Daya Dana
 3. Sumber Informasi
- b. *Proses* meliputi:
 1. Perencanaan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Pengawasan Kegiatan
- c. *Output* meliputi :
 1. Peningkatan Kemampuan Pegawai
 2. Pemahaman Terhadap Tugas dan Fungsi Pegawai

E. Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan program.

F. Variabel Penelitian

a) Klasifikasi Variabel

Menurut Sugiyono (2003:39), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel mandiri yaitu evaluasi program. Penelitian ini ingin mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

b) Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah “ istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial” (Singarimbun dan Effendi, 1992:32). Adapun definisi konsep dari penelitian ini yaitu:

1. Evaluasi adalah usaha untuk mengukur atau memberikan nilai secara objektif

terhadap hasil-hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya

2. Sumber Daya Aparatur merupakan manusia penggerak atau yang melakukan aktivitas dan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Evaluasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melihat keberhasilan program yang telah dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui indikator *input*, proses dan *output*.

c) Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel sama. (Singarimbun dan Effendi, 1995:23). Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari:

1. *Input* meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sumber Daya Dana
 - c. Sumber Informasi
2. *Proses* meliputi:
 - a. Perencanaan Kegiatan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Pengawasan Kegiatan
3. *Output* meliputi :
 - a. Peningkatan Kemampuan Pegawai
 - b. Pemahaman Terhadap Tugas dan Fungsi Pegawai

G. Pemilihan Informan

Arikunto (2004: 122) mengemukakan bahwa, informan dapat disamakan dengan partisipan penelitian, yaitu subyek penelitian dimana dari mereka data penelitian diperoleh. Selanjutnya menurut Huberman dan Miles (dalam Bungin, 2003: 89) informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka cross check data.

Informan diambil dari beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang meliputi:

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Kepala Sub bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Kepala Sub bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Sub bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Serta 2 orang staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada pegawai sebagai penyelenggara program dan kegiatan yang dilakukan. Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Teknik wawancara ini dilakukan dengan semua informasi yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari para informan tersebut.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Literatur tersebut terdiri dari hasil penelitian, surat kabar, peraturan-peraturan, buku, dokumen Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Observasi, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan terhadap kondisi dilapangan yang berhubungan dengan subjek penelitian yaitu di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, Analisis Data Kualitatif (Danim, 2002:218) adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola mensitensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa *data kualitatif*. Data kualitatif yakni berbentuk kata-kata hasil wawancara. Setelah itu hasil penelitian ini akan dianalisis secara baik sehingga pada akhirnya akan memberikan suatu kesimpulan yang baik dan valid terhadap fakta di lapangan.

Sementara itu teknik pengumpulan data didasarkan pada triangulasi data, baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data) triangulasi sumber data-data (memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan triangulasi pengumpulan data beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah. Dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnnya.

Dalam menganalisis data secara kualitatif tersebut, ada dua tahap yang harus ditempuh, yaitu:

1. Tahap pertama, data primer yang sudah ada didapat berupa keterangan yang diberikan oleh *key informan* dikumpulkan dan diberikan klasifikasi.
2. Tahap kedua, setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan sesuai dengan kategori-kategorinya, kemudian data itu ditampilkan dan diberi interpretasi dan dianalisis secara lebih mendalam sesuai dengan definisi operasional dalam penelitian ini.

J. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 merupakan unsur Staf Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati Musi Banyuasin.

Pembentukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 505 Tahun 2000 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Keputusan tersebut menjabarkan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi susunan dan tata kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas yaitu: “Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum”.

Sedangkan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain:

1. Mengkoordinasikan rumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
2. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah;
3. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
4. Menghimpun Peraturan Perundnag-Undangan, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum.

Adapun uraian tugas dari masing-masing sub bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaen Musi Banyuasin antara lain:

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaanya.

2. Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah.

3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum,

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menertibkan lembaran daerah dan berita daerah serta mengatur penyebaran dokumentasi hukum.

Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000, susunan organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

1. Kepala Bagian
2. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
3. Sub Bagian Bantuan Hukum
4. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Kondisi kepegawaian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 14 orang yang terdiri dari 8 orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 orang tenaga honorer. Berikut keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.1
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Di Bagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/SMA	4
2	Sarjana Muda / Diploma III	-
3	Strata 1 (SI)	9
4	Strata 2 (S2)	1
Jumlah		14

Sumber : *Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Musi Banyuasin*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sumber daya aparatur yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 14 orang dengan kualifikasi pendidikan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 4 (empat) orang, pendidikan Strata Satu (SI) sebanyak 9 (sembilan) orang dan berpendidikan Strata Dua (S2) hanya 1 (satu) orang.

Visi dan Misi Bagian Hukum

Guna menghadapi tantangan dan kemajuan baik nasional dan global, maka instansi pemerintah harus mempunyai pandangan/wawasan jauh kedepan, agar tetap konsisten, eksis antisipatif, berinovatif serta produktif dalam bekerja sesuai dengan bidang dan tugasnya, maka haruslah mengadakan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis sehingga dapat menyelaraskan antara visi dan misi dengan potensi, peluang serta kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Agar rencana strategis instansi pemerintahan dapat terwujud, maka segenap jajaran harus berperan aktif dalam menjabarkan cita-cita dan citra organisasi dimasa yang akan datang serta berkemampuan menumbuhkan komitmen seluruh jajaran, dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan juga dilihat dari potensi dan kondisi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menentukan perencanaan kegiatan yang menghasilkan program-program pembangunan yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muba menetapkan rumusan visi sebagai berikut:

"Mewujudkan Masyarakat Sejahtera di Bumu Serasan Sekate yang Dilandasi Oleh Pemerintah Yang Adil, Jujur dan Bertanggung Jawab".

Guna merealisasikan visi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta memberikan gambaran dan petunjuk yang jelas tentang kegiatan yang harus dilaksanakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka dirumuskan Misi Bagian Hukum sebagai berikut:

"Menegakkan Supremasi Hukum, Demokrasi dan Budaya yang Berkepribadian".

Tujuan dan Sasaran Organisasi

Dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi agar lebih terarah dalam pencapaian sasarannya melalui kebijakan, program dan kegiatan serta berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum, maka tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

"Menegakkan pembangunan hukum, demokrasi dan budaya yang berkepribadian".

Sedangkan untuk tercapainya tujuan di atas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

"Terdukungnya penegakan hukum yang berkeadilan dan kehidupan demokrasi, politik serta tergalinya dan berkembangnya budaya daerah Musi Banyuasin untuk mengisi dan mewarnai pembangunan".

Strategi dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Bagian Hukum melakukan langkah-langkah dengan menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
6. Program Penataan Perauran Perundang-Undangan

K. PEMBAHASAN HASIL ANALISIS

Pada uraian ini memaparkan temuan penelitian mengenai evaluasi program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Terdiri dari hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan diskusi.

Penelitian ini menghasilkan data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan *key informant* yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara sekaligus observasi yang dilakukan dalam beberapa hari yaitu pada tanggal 6, 7 dan 8 Januari 2012. Selain wawancara dan observasi, digunakan pula studi dokumentasi dari data-data yang berkaitan dengan penelitian. Berikut hasil penelitian untuk melihat hasil pelaksanaan program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, ditinjau dari tiga aspek yaitu *input*, proses dan *output*.

1. *Input*

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan dari faktor-faktor *input* dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada analisis ini akan diuraikan, dianalisis serta dibahas hasil penelitian dari lapangan baik berupa hasil wawancara maupun melalui sumber data lain yang berhubungan dengan penelitian. Berikut uraiannya dari indikator *input*:

a. Sumber Daya Manusia

Analisis ini untuk melihat faktor sumber daya manusia sebagai *input* dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya aparatur pemerintahan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan setiap kegiatan, termasuk pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pelaksanaan setiap kegiatan tentunya melibatkan banyak pihak di dalamnya, seperti halnya pelaksanaan program ini yang antara lain melibatkan sasaran program dan pihak-pihak yang terlibat lainnya dalam pelaksanaan program tersebut.

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang diadakan oleh Bagian Hukum merupakan suatu langkah dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam hal ini pegawai dengan mengadakan bimbingan teknis mengenai implementasi peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terurai dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak H. Yudi Herzandi, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Rabu, 06 Oktober 2010 :

“Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dalam rangka memberikan bimbingan teknis kepada pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka di dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan ...”

Lebih lanjut beliau menguraikan :

“Tentu saja, setiap pelaksanaan program yang telah dikeluarkan akan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. khususnya pemerintah. Dalam hal ini tentunya pemerintah mempunyai peranan penting didalam pelaksanaannya”.

Merujuk pada hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pemerintah merupakan unsur penggerak yang memiliki peranan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian adanya sumber daya yang berkualitas dan profesional sangat membantu dan mendukung pelaksanaan pekerjaan dan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan terutama sebagai aparatur negara.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dilakukan kepada Staf Bagian Bantuan Hukum pada hari Rabu, 06 Oktober 2010 :

“Maksud dan tujuan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bagian Hukum Setda Kabupaten Muba adalah sebagai pedoman/acuan kerja bagi pegawai pada bagian hukum untuk meningkatkan kinerja pegawai...”

Lebih lanjut diuraikan :

“... Pihak yang berperan dalam pelaksanaan program yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD dengan melibatkan Dinas terkait seperti BKD, Bagian Hukum Bappeda dan lain-lain. Di sinilah butuh peran aktif pemerintah untuk melaksanakan program yang telah direncanakan”.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut diketahui informasi bahwa Pemerintah sebagai *leading sector*, khususnya pihak yang melaksanakan program ini yaitu Pemerintah Daerah yang kemudian mengkoordinasikan kegiatan dengan Bagian Hukum.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penyelenggara program memiliki sumber daya aparatur yang terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Di Bagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/SMA	4
2	Sarjana Muda / Diploma III	-
3	Strata 1 (SI)	9
4	Strata 2 (S2)	1
Jumlah		14

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Musi Banyuasin

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sumber daya aparatur yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 14 (empat belas) orang. Dilihat dari tingkat pendidikannya, masih ada pegawai yang belum berpendidikan sarjana.

Pelaksanaan program akan berjalan secara optimal dan maksimal bila sumber daya manusia memiliki kemampuan didalam melaksanakannya, tentu saja kemampuan tersebut ini adalah mereka yang telah mengenyam pendidikan lebih tinggi dan mampu menguasai ilmu dan pengetahuan itu dengan baik serta pengalaman kerja yang mereka miliki. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan , 07 Januari 2012 diperoleh informasi sebagai berikut:

“Secara Kenyataan dilapangan, sumber daya manusia yang ada belum memenuhi untuk melaksanakan program karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pegawai di Bagian Hukum”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam wawancara yang dilakukan pada , 06 Januari 2012:

“Sumber daya manusia yang ada belum memenuhi standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada, kendala ini muncul karena jenjang pendidikan yang didapat tidak sesuai dengan penempatan dan pengalaman kerja yang ada ...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwa menurut pegawai yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin, sumber daya manusia yang melaksanakan program belum memiliki kemampuan yang handal dalam melaksanakan program maupun melaksanakan tugas pokok dan fungsi lainnya sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian hasil wawancara serta analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa input dari faktor sumber daya manusia yaitu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program belum memiliki kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sumber Daya Dana

Analisis ini untuk melihat pelaksanaan faktor dana sebagai *input* dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekreariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undngan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik secara rutin maupun periodik membutuhkan adanya faktor pendukung, salah satunya adalah masalah pembiayaan yaitu dana. Dana yang dimaksud disini adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian diteruskan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pihak yang melaksanakan program. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undngan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada , 06 Januari 2012 :

“Adapun sumber dana dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin...”

Lebih lanjut beliau menguraikan :

“... dana ini kemudian diteruskan kepada pihak yang menangani masalah program, seperti di Kabupaten ini yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan bimbingan teknis sebagai pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibiayai oleh dana operasional yang berasal dari anggaran daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Memperkuat informasi di atas, wawancara juga dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam wawancara yang dilaksanakan pada , tanggal 07 Januari 2012 :

“Sumber dana dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin”

Merujuk pada beberapa hasil wawancara tersebut diketahui informasi bahwa sumber dana untuk pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengenai dana ini terurai dalam wawancara yang dilakukan dengan Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada , tanggal 07 Januari 2012 :

“Kami menggunakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, namun dana tersebut dirasa belum cukup memadai walaupun dana tersebut sudah dianggarkan disesuaikan dengan kebutuhan”

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada , tanggal 07 Januari 2012 :

“Dana dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan setiap tahun. Namun dana tersebut belum dianggap cukup dalam pengoptimalan kerja terutama dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa dana yang digunakan dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang diprogramkan oleh pemerintah daerah dinilai belum memadai atau belum cukup.

Berdasarkan uraian hasil wawancara, studi dokumentasi pada data sekunder yang ada serta analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa input dari faktor dana yaitu yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) namun dana yang tersedia tersebut memadai untuk melaksanakan program walaupun sudah dianggarkan namun belum sesuai dengan kebutuhan.

c. Sumber Informasi

Analisis ini untuk melihat pelaksanaan faktor informasi sebagai *input* dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya:

Sumber daya informasi sebagai bagian dari input suatu kegiatan merupakan salah satu unsur penunjang yang dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan kegiatan. Adapun informasi yang terdapat dalam pelaksanaan program yaitu berupa pengetahuan mengenai acuan atau dasar hukum pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Serta seberapa paham dalam mengetahui tanggung jawab dari pelaksana program.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada , tanggal 07 Januari 2012 , diperoleh informasi sebagai berikut:

“Informasi yang diperlukan untuk kapasitas tersebut seperti acuan dasar hukum pelaksanaan program, serta tanggung jawab dari pegawai sendiri untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan di dalam program”

Masih dalam wawancara yang sama juga diperoleh informasi sebagai berikut:

“....Penyampaian informasi dalam program yaitu dengan cara membaca dan meneliti Perda yang menjadi tugas dan fungsi

yang berhubungan dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur....”

Masih terdapat kendala mengenai informasi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kendala yang terjadi menurut Kepala Seksi Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan sebagai berikut:

”.....Kendala yang ada dalam pelaksanaan program selain masalah dana dan sumber daya manusia yaitu masih kurangnya rasa tanggung jawab pegawai terhadap Tupoksi sebagai dasar acuan kerja pelaksanaan kegiatan dan program peningkatan Sumber Daya Aparatur.”

Berdasarkan uraian hasil wawancara, studi dokumentasi pada data sekunder yang ada serta analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *input* dari faktor informasi berupa acuan serta dasar hukum pelaksanaan, dalam hal ini terdapat kendala yang dihadapi dalam hal kurangnya tanggung jawab pegawai dalam mencari dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan program.

2. Proses

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (*controlling*). Pada analisis ini akan diuraikan, dianalisis serta dibahas hasil penelitian dari lapangan baik berupa hasil wawancara maupun melalui sumber data lainnya. Berikut uraiannya tersebut :

a. Perencanaan Kegiatan

Analisis ini untuk melihat faktor perencanaan sebagai proses dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, serta staf di Bagian Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Perencanaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah beragam persiapan atau penentuan-penentuan yang terlebih dahulu dilakukan mengenai apa yang akan dikerjakan di kemudian hari dalam batas waktu tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Maksudnya terdapat beragam rencana-rencana yang akan dilakukan dikemudian hari dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai rencana-rencana dalam rangka menyelenggarakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Penelitian mengenai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini pada kajian bidang pelatihan diperuntukkan aparatur yang kelak akan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada , tanggal 07 Januari 2012 diperoleh informasi sebagai berikut:

“....Proses perencanaan dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tersebut dilakukan pada awal tahun anggaran dimana program-program apa saja yang akan dilaksanakan kemudian dituangkan dalam anggaran kegiatan.....”.

Sejalan dengan pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam wawancara pada tanggal 07 Januari 2012 , sebagai berikut:

”....pada awal tahun anggaran seperti biasa dilakukan perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang dianggarkan melalui kas daerah. Begitu pun dengan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Muba, perencanaannya dilakukan pada awal tahun yang kemudian selanjutnya akan diadakan pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan yang dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas, diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan persiapannya pada awal tahun anggaran, dimana disusun serta

direncanakan kegiatan dari program tersebut yang kemudian dianggarkan melalui Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Perencanaan tentunya melibatkan sumber daya manusia yang berperan dalam merencanakannya. Begitu juga dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Hasil wawancara berikut ini menggambarkan pihak yang terlibat dalam perencanaan program.

”...Yang terlibat dalam perumusan program adalah Kepala Bagian beserta staf pegawai yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selain itu juga berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk proses perencanaan anggarannya.

Dari wawancara tersebut terurai bahwa Kepala Bagian juga dilibatkan dalam proses perencanaannya. Begitu juga dengan staf juga terlibat dalam proses perencanaan program. Dengan pernyataan tersebut diketahui bahwa pada tahap perencanaan ada kerjasama yang dilakukan oleh pegawai baik sesama pegawai maupun dengan atasan. Perencanaan yang dilakukan dinilai tidak mendapat kendala karena sudah berpedoman pada perencanaan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 07 Januari 2012.

“tidak ada hambatan dalam proses perencanaan program karena saya selaku Kepala Bagian juga ikut andil didalamnya dan dibantu oleh staf yang ada. Namun perencanaan tersebut juga dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang lebih mengerti, mengingat pegawai yang disini juga belum banyak berpengalaman yang lebih tinggi.”

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa tidak ada hambatan yang berarti dalam proses perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan yang dilakukan pada awal tahun anggaran yang kemudian akan dianggarkan melalui Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selain itu tidak ada hambatan berarti dalam proses perencanaannya.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Analisis ini untuk melihat faktor pelaksanaan dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Pergerakan pelatihan dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan/ pelaksanaan pelatihan. Pergerakan berarti suatu tindakan untuk dapat mengusahakan agar semua anggota kelompok mau bekerja dengan senang hati sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang harus dipakai dan dipedomani dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

Berikut hasil analisis yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam wawancara pada tanggal 07 Januari 2012

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur antara lain: melakukan bimbingan kepada pegawai untuk memahami tupoksi sebagai dasar kerja, Melakukan Bimtek dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh informasi yang disampaikan oleh staf Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin bahwa, setelah dilakukan perencanaan kemudian melakukan langkah-langkah dan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan bimbingan teknis. Namun kendala yang ada pelaksanaan bimbingan teknis belum bisa berjalan optimal karena masih terbatasnya dana operasional yang dianggarkan.

Dilihat dari data sekunder yaitu berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Sekretaria Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dilihat dari realisasi anggaran telah mencapai 95%. Dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.000.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan melaksanakan pelatihan berupa bimbingan teknis kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.

c. Pengawasan Kegiatan

Analisis ini untuk melihat faktor pengawasan sebagai salah satu proses yang dilakukan dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undnagan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Pengawasan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan program. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, dengan adanya pengawasan dapat menentukan proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan ataukah belum.

Pengawasan sendiri dapat diartikan sebagai pengendalian dimana pada tahap ini akan dilakukan penilaian, adanya koreksi sehingga apa yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan.

Tahapan akhir dari pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

adalah pengawasan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dalam wawancara pada , tanggal 07 Januari 2012 .

"Dalam pengawasan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terlibat langsung adalah Kepala Bagian, Kasubbag yang membawahi staf yang bersangkutan.

Selanjutnya diuraikan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin:

"Bentuk pengawasan tersebut antara lain melakukan pembinaan dan pengendalian dari atasan langsung".

Bentuk pengawasan yang dilakukan seperti yang telah diuraikan sebelumnya merupakan jenis pengawasan interen, namun dalam pelaksanaan program ini juga dilakukan pengawasan yang dilakukan secara eksteren yaitu oleh pihak Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan pembinaan dan pengendalian secara langsung dari atasan serta dari pihak inspektorat kabupaten.

3. Analisis Output

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui *output* atau hasil pelaksanaan dengan melihat pencapaian tujuan dan sasaran dari program. Pada analisis ini akan diuraikan, dianalisis serta dibahas hasil penelitian dari lapangan baik berupa hasil wawancara maupun melalui sumber data lainnya. Berikut uraiannya tersebut:

a. Peningkatan Kemampuan Pegawai

Analisis ini untuk melihat *output* pencapaian tujuan pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Muba, serta staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muba. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Peningkatan kemampuan pegawai merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini sesuai dengan pernyataan

wawancara yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 06 Januari 2012 .

“....salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program yaitu agar adanya peningkatan kemampuan pegawai, dimana selama ini dinilai aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin....”

Dari informasi tersebut diketahui bahwa tujuan yang dicapai dari program yaitu adanya peningkatan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Adapun menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 06 Januari 2012 , diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis, terdapat peningkatan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”.

Informasi di atas, didukung dari hasil wawancara yang disampaikan oleh staf pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

“ setelah dilaksanakan bimbingan teknis sebagai kegiatan program terdapat hasil yang positif dimana kami sebagai staf bisa lebih baik lagi melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kami dalam melaksanakan fungsi Bagian Hukum di Kabupaten Musi Banyuasin.

Adanya peningkatan kemampuan dari aparatur tersebut memang sesuatu yang diinginkan dari adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam hal penyelenggaraan bimbingan teknis dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, hal ini dikarenakan peningkatan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program padat karya dan program kesehatan, sedangkan program non fisik dapat dilakukan melalui diklat. Oleh karena itu pendidikan dan latihan adalah merupakan bentuk pemberdayaan yang dapat melengkapi para pimpinan atau aparat dengan pengetahuan dan sikap atau perilaku untuk memelihara organisasi secara efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa adanya peningkatan kemampuan pegawai karena adanya pelatihan berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Pemahaman Terhadap Tugas dan Fungsi Pegawai

Analisis ini untuk bertujuan untuk melihat output mengenai pemahaman terhadap tugas dan fungsi pegawai. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diketahui informasi sebagai berikut ini:

“setelah adanya bimbingan teknis, kami sebagai pegawai disini merasa sudah memahami tugas dan fungsi yang diberikan kepada kami....”

Sejalan dengan pendapat tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Memang benar terdapat peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pegawai setelah adanya pelatihan yang diadakan disini”

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis hasil penelitian diketahui bahwa adanya peningkatan kemampuan pegawai karena adanya pelatihan berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

L. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Input

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan setiap kegiatan, termasuk pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pelaksanaan setiap kegiatan tentunya melibatkan banyak pihak di dalamnya, seperti halnya pelaksanaan ini yang antara lain melibatkan sasaran program dan pihak-pihak yang terlibat lainnya dalam pelaksanaan program tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *input* dari faktor sumber daya manusia yaitu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program belum memiliki kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini berarti masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari segi pelaksana program.

Indikator input kedua yaitu sumber daya dana. Dana merupakan sumber daya penunjang yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana yang memadai maka suatu kegiatan akan berjalan tersendat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada faktor sumber daya dana dapat disimpulkan bahwa *input* dari faktor dana yaitu yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) namun dana yang tersedia tersebut belum memadai untuk melaksanakan program walaupun sudah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.

input yang selanjutnya yaitu sumber daya informasi. Informasi dibutuhkan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Faktor informasi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa acuan serta dasar hukum pelaksanaan, dalam hal ini terdapat kendala yang dihadapi dalam hal kurangnya tanggung jawab pegawai dalam mencari dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan program.

2. Proses

Proses pertama yang dilakukan dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah melakukan perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dari suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses perencanaan yang dilakukan pada awal tahun anggaran yang kemudian akan dianggarkan melalui Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selain itu tidak ada hambatan berarti dalam proses perencanaannya.

Analisis pada indikator kedua yaitu kegiatan pelaksanaan program. Dari hasil penelitian diperoleh diketahui bahwa pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan melaksanakan pelatihan berupa bimbingan teknis kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.

Proses selanjutnya yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan berfungsi dalam pengendalian kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan pembinaan dan pengendalian secara langsung dari atasan serta pengawasan eksteren dari pihak inspektorat kabupaten.

3. Output

Peningkatan kemampuan pegawai merupakan salah satu output yang diharapkan dari pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya peningkatan kemampuan pegawai karena adanya pelatihan berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Output yang kedua sebagai hasil yang diharapkan adalah pemahaman terhadap tugas dan fungsi pegawai. Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilakukan kegiatan bimbingan teknis, terdapat peningkatan pemahaman pegawai tugas dan fungsinya di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

M. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, analisis hasil penelitian dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala-kendala yang perlu diperbaiki dalam rangka pelaksanaan program selanjutnya.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih kurangnya kemampuan sumber daya aparatur, terbatasnya dana yang digunakan dalam pelaksanaan program serta masih kurangnya informasi yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program.

N. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis di dalamnya serta kesimpulan yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian, antara lain:

1. Perlunya bimbingan teknis secara kontinyu kepada pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Diharapkan adanya alokasi dana yang lebih banyak lagi rangka keberhasilan program dan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur.
3. Pada saat mutasi pegawai, diharapkan dapat melihat kesesuaian tingkat pendidikannya dengan bidang tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Firman & Sirait Martin. 1984. *PDE, Perencanaan dan Evaluasi suatu Sistem untuk proyek pembangunan*. Jakarta: Bina aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Grindle, Merilee S. 1997. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. Princetown University Press: New Jersey.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Handoko, Hani. T. 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, SP. Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 1999. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moekijat. 1991. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia
- Pestaria. 1994. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*. Palembang.
- Siagian, P. Sondang. 1987. *Sistem Informasi Manajemen Untuk Pengambilan Keputusan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta : LP3ES
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Taybnapis, Farida Yusuf. 2004. *Evaluasi Program*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1999. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Grafindo Persada.

Pengaruh omset UMKM dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Palembang

oleh:
LAMAZI

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
Lamazilamaz67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh omset UMKM dan tenaga kerja terhadap PDRB sektor Industri Pengolahan kota Palembang. Penelitian ini menggunakan data skunder dari BPS dari tahun 2016-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier ganda dengan metode OLS. Variabel omset UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan kota Palembang. Nilai koefisien pada variabel Omset UMKM sebesar 1,706 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan jumlah omset umkm sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 1,706 Miliar rupiah. Sementara itu, variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan Kota Palembang.

Kata kunci: **UMKM, Omset, Tenaga Kerja, PDRB, IndustriPpengolahan**

Latar Belakang

UMKM sangat membantu dalam memajukan dan mendorong pertumbuhan perekonomian negara. UMKM juga dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga berkurangnya tingkat kemiskinan di suatu negara. Tidak hanya itu UMKM juga dapat membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, struktur perekonomian yang seimbang, serta mampu mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur oleh jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan cara membandingkan jumlah produk domestik bruto tahun yang sedang berjalan dengan jumlah produk domestik bruto tahun sebelumnya Kota Palembang yang merupakan ibukota provinsi juga sebagai pusat perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tidak mengherankan bahwa kota ini

memiliki PDRB tertinggi dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Perekonomian kota Palembang pada tahun 2020 menurut BPS merupakan yang terbesar di Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) yaitu senilai Rp 155,82 triliun pada tahun lalu. Perekonomian kota tersebut menyumbang 33,69% dari total PDRB ADHB seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. PDRB Kota Palembang terbesar ditopang oleh industri pengolahan yang mencapai Rp 48,71 triliun atau sebesar 31,26%.(databoks,2021)

Berdasarkan dari hal tersebut, peneliti berkeinginan untuk mengkaji tentang pengaruh UMKM dan Tenaga Kerja terhadap PDRB sektor industri pengolahan Kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh UMKM dilihat dari besarnya Omset UMKM dan Tenaga Kerja terhadap PDRB sektor Industri pengolahan Kota Palembang.

Kajian Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang didefinisikan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno,1985).

Sementara pengertian dari Produk domestik regional bruto menurut BPS adalah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah atau suatu negara dalam waktu tertentu. Badan Pusat Statistik (2016) Produk domestik regional bruto terdiri dari sembilan sektor meliputi : Pertanian,

peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Dalam perhitungannya Produk Domestik Regional Bruto dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku (Janah, 2017). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh harga yang sedang berlaku (Bank Indonesia, 2011).

Selanjutnya Menurut Julian Siburian, (2020) indikator dari pendapatan produk domestik bruto daerah (PDRB) ada 4 yaitu:

1. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha

2. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha
3. PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha
4. PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha
5. Indeks harga implisit PDRB menurut lapangan usaha
6. Laju implisit PDRB menurut lapangan usaha.

Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter dengan adanya intermediasi perbankan merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. adanya pinjaman modal dari perbankan maka akan meningkatkan produksi dari UMKM. Ketika produktivitas UMKM meningkat menyebabkan pendapatan perkapita akan meningkat juga akan meningkat, jika pendapatan perkapita naik maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Pembagiannya sendiri sebagai berikut

1. Usaha produktif yang memiliki kekayaan sampai Rp 50 juta rupiah dan memiliki pendapatan sampai Rp 300 juta per tahun digolongkan dalam usaha mikro.
2. Usaha kecil dengan jumlah kekayaan Rp 50 juta sampai dengan Rp500 juta dengan total penghasilan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 milyar pertahun di kategorikan dalam usaha kecil.
3. Usaha kecil dengan jumlah kekayaan Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar dengan total penghasilan antara Rp 2,5 milyar hingga Rp 5 milyar

pertahun di kategorikan dalam usaha menengah.(JANAH, 2017)

Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu factor produksi. Menurut Djojohadikusumo dalam Baibaba (2008) tenaga kerja yaitu semua orang yang sanggup bekerja. Golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri, anggota keluarga yang akan menerima upah (uang) seperti mereka yang bekerja untuk menerima gaji dan upah. Golongan tenaga kerja ini juga meliputi mereka yang menganggur, tetapi sesungguhnya mampu untuk bekerja.

Penelitian Terdahulu

Prasetyo (2022) dalam penelitiannya menunjukan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Deli Serdang. Janah (2017) dalam penelitiannya mengemukakan variabel omzet UMKM berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel sektor industri pengolahan pada PDRB di Jawa Tengah.

Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan merupakan suatu cara yang ilmiah dalam mendapatkan data sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Selanjutnya penelitian membutuhkan desain penelitian. Adapun fungsi dari desain penelitian untuk membantu pelaksanaan agar penelitian dapat berjalan dengan lancar (Ewa P, dkk, 2022).

Pada penelitian ini digunakan metode analisis data asosiatif deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh omset umkm dan tenaga kerja terhadap PDRB sektor industri pengolahan kota Palembang. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Untuk mengolah data kuantitatif digunakan dengan menggunakan program SPSS.18.

Penelitian dilaksanakan di bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh data *time series* (data deretan waktu) yaitu Omset Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jumlah Tenaga Kerja dan Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) sektor industri pengolahan kota Palembang yang diambil selama 5 tahun dari 2016 – 2020.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling jenuh* yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Berdasarkan pengambilan sampel tersebut, maka peneliti dapat memperoleh jumlah sampel (n) dari data *time series* selama periode tahun 2016-2020.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh UMKM dan Tenaga kerja terhadap pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di kota Palembang. Setelah dilakukan proses uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji

heterokedasitas dan uji multikolinieritas, maka hasil pengolahan data melalui alat stata dapat dijelaskan hasilnya seperti pada Gambar.1 dibawah ini

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20182.122	6990.542		2.887	.102
OMS	.002	.001	1.706	3.285	.081
NAKE				-	
R	-.196	.116	-.872	1.679	.235

- a. Dependent Variable: PDRB
- b. R = 0,96
- c. R Square = 0,921
- d. Adjust R square = 0,843
- e. F = 11,701 sig= 0,079

Gambar 1. Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas model estimasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{LnPdrb} = 20182,122 + 1,706 \text{ Omset} - 0.872 \text{ Naker} + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstantan sebesar **20182,122** menunjukkan bahwa jika variabel omset UMKM dan tenaga kerja dianggap bernilai nol maka besar pertumbuhan PDRB di sektor Industri pengolahan dikota Palembang tumbuh sebesar 20 182,122 persen.
2. Nilai koefisien pada variabel Omset UMKM sebesar **1,706** menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan jumlah omset umkm sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 1,706 Miliar rupiah.
3. Nilai koefisien tenaga kerja sebesar **- 0.872** menunjukkan bahwa bahwa jika terjadi penambahan 1 orang tenaga kerja akan menurunkan PDRB sebesar 0,872 miliar rupiah namun tidak signifikan.

Uji t-statistik

Uji t statistik dilakukan untuk mengetahui

pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan dengan uji t statistik, adapun caranya yaitu dengan melihat t_{hitung} lalu kita bandingkan dengan t_{tabel} atau dengan cara lainnya yaitu cukup dengan melihat nilai probabilitasnya atau p.value. jika nilai p value bernilai dibawah 0,005 maka dia signifikan pada level 5 persen. Namun jika besar p value berada dibawah 0.010 maka signifikan pada level 10 persen. Jika nilai p value diatas 0,010 berarti tidak signifikan. Pada penelitian ini hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Variabel jumlah Omset UMKM memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,285 atau nilai signifikannya sebesar 0,081. Jika melihat nilai 0,081 lebih kecil dari 0,010 berarti dapat disimpulkan bahwa variabel omset UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan di kota Palembang pada level 10 persen.

2. Variabel tenaga kerja nilai t hitung sebesar 1,679 dan nilai signifikan sebesar 0,235 atau lebih besar dari 0,010 berarti menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB sektor Industri Pengolahan di Kota Palembang. Ketidak signifikan ini sangat menarik untuk dikaji pada penelitian berikutnya. Ketidaksignifikan ini dan nilai koefisiennya ditemukan bertanda negatif diduga diakibatkan perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan sangat terbatas, sehingga tenaga kerja yang digunakan juga terbatas. Jika tenaga kerja ditambahkan maka justru akan menurunkan produktivitas tenaga kerja (law diminishing return).

Uji Simultan (Uji F)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh nyata atau tidak secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan

membandingkan nilai F-hitung dengan Ftabel:

Kriteria: H_0 diterima apabila $\text{Prob}(F\text{-Statistik}) > (0,05)$

H_1 diterima apabila $\text{Prob}(F\text{-Statistik}) < (0,05)$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa F-statistik adalah 11.701 dan nilai signifikan sebesar 0,079. Nilai sig 0,079 bernilai lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil dari 0,10. Hal ini menunjukkan secara simultan bahwa variabel omset umkm dan variabel tenaga kerja secara bersama sama berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di sektor industri Pengolahan kota Palembang pada signifikansi 10 persen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil regresi diatas dapat diperoleh nilai koefisien determinan (R^2) sebesar 0.921 atau sebesar 92%. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu jumlah Omset UMKM (X_1), dan jumlah tenaga kerja (X_2) dapat

menjelaskan besarnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan kota Palembang tahun 2016-2020 sebesar 92 persen. Adapun sisanya sebesar 8% dipengaruhi dengan faktor lain di luar variabel dalam penelitian ini.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel omset UMKM berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PDRB sektor Industri Pengolahan Kota Palembang pada signifikansi 10 persen, sedangkan pada signifikansi 5 persen tidak berpengaruh secara signifikan.
2. Variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan kota Palembang. Hal ini diduga jumlah usaha di bidang sektor industri pengolahan sangat terbatas dan juga diduga sudah menggunakan mesin, sehingga peran tenaga kerja

menjadi disektor ini sudah mulai dikurangi.

Sementara itu, saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditumbuhkan usaha baru pada sektor industri pengolahan kota Palembang, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja.
2. Dikarenakan pada penelitian ini variabel tenaga kerja tidak signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan kota Palembang, maka disarankan untuk mengkaji lebih mendalam tentang tenaga kerja di sektor industri pengolahan kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2011. Jenis Produk Domestik Regional Bruto. bl.go.id/jenis PDRB/ diakses tanggal 12 November 2016.
- Baibab, Yohanis. 2008. " Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PDRB Provinsi Papua." Skripsi. Universitas Cenderawasih: Jayapura.
- Prasetyo¹, E Yuliana², Y, & Hidayat T (2022).. Pengaruh jumlah UMKM, jumlah pendapatan domestik bruto (PDRB) dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Deli Serdang, *jurnal Bisnis Net* Vol 5 No 1
- Sri Juliana Siburian. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2014- 2018*. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Sugioyo. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R (edk.20)*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2016. *Ekonomi Pembangunan (Proses, masalah, dan kebijakan)*. Kencana Prenada. Jakarta.
- Janah, R, Neni 2017, Pengaruh KUR, Omset UMKM, jumlah Tenaga Kerja, dan jumlah umkm terhadap sektor Industri pengolahan pada PDRB di Jawa Tengah (skripsi), Unnes, Semarang.
- Salim, Mursalam, (..), Pengaruh Investasi dan Tenaga kerja Terhadap PDRB Provinsi Papua, <https://media.neliti.com/media/publications/55742-I> dirujuk tgl 27 Nop. 22 jam 16.00 wib
- Kusnandar Viva (2021). *Perekonomian kota Palembang Terbesar di Sumatera Selatan Tahun 2020*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/05/> dirujuk tanggal 28 Nop 22 jam 2.30 wib

PENGARUH TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PALEMBANG

Oleh:

1. **UM SALAMAH**
[**\(ceuceu2157@gmail.com\)**](mailto:ceuceu2157@gmail.com)
BPSDMD Prov Sumsel
2. **LAMAZI**
[**\(lamazilamaz67@gmail.com\)**](mailto:lamazilamaz67@gmail.com)
BPSDMD Prov Sumsel

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan data skunder dari BPS dari tahun 2017-2021. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier ganda dengan metode Generalized Linear Model (GLM). Hasil penelitian menunjukkan variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang. Nilai koefisien tenaga kerja sebesar 1.257 menunjukkan bahwa jika terjadi penambahan 1 orang tenaga kerja maka akan meningkatkan PDRB (proxy pertumbuhan ekonomi) kota Palembang sebesar 1,257 Miliar rupiah.

Kata kunci: Tenaga Kerja, PDRB, GLM. Pertumbuhan ekonomi

Latar Belakang

Aspek ketenagakerjaan merupakan hal penting yang dapat menjadi indikator kemajuan perekonomian. Dalam hal ini, tenaga kerja merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Sebagai modal pembangunan, tenaga kerja dapat mempercepat perkembangan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan.

Teori Pertumbuhan

Ekonomi Neo Klasik
menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu ; modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 1994). Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya

masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota.

Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah

Untuk mengetahui perkembangan penduduk usia kerja di Kota Palembang tahun 2020-2021 dapat dilihat Tabel 1. Dibawah ini

Tabel.1. Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang

Uraian	2020	2021
TPAK (%)	65,41	63,93
Tingkat Pengangguran (prosentase)	9,86	10,11
Bekerja (jiwa)	756.546	748.610
Angkatan Kerja (jiwa)	839.317	832.803
Pencari Kerja (jiwa)	1.407	1.665

Sumber. BPS:2021

Pada tabel 1 di atas menunjukkan terjadi penurunan orang yang bekerja di tahun 2022 dibandingkan dengan orang yang bekerja di tahun 2021. Hal ini diduga terjadinya dampak dari pandemi covid.19.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji perang tenaga kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Palembang.

Landasan Teori

Lewis mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain.

Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan). Sektor informal

mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan.

Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak.(Todaro, 2004). Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas tahun 2020 adalah konsep Standar Labour Force Concept yang disarankan oleh The International Labour Organization (ILO), sebagaimana dijelaskan pada grafik dibawah ini:

Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan

Beberapa konsep dan definisi terkait ketenagakerjaan yang digunakan BPS dalam Sakernas antara lain:

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk Usia Kerja Terdapat beberapa pendekatan dalam menentukan batas usia kerja. Dalam publikasi ini,

Batas usia kerja yang digunakan adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu (pada masa referensi survei) hanya melakukan aktivitas sekolah, mengurus rumah tangga,atau tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja atau mencari pekerjaan.

Adapun definisi dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Sekolah yaitu kegiatan bersekolah formal maupun non formal baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.

- ii. Mengurus rumah tangga yaitu kegiatan mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan gaji/upah (seperti menyapu, memasak, mencuci, dll). Seorang pembantu rumah tangga yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga dianggap bekerja, karena mereka melakukannya untuk mendapatkan gaji/upah.
- iii. Kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi, yaitu kegiatan selain bekerja sekolah, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya yang dicakup disini adalah kegiatan yang bersifat aktif seperti: olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial ataupun keagamaan. Tidak termasuk kegiatan pribadi seperti tidur, santai, bermain, dan tidak melakukan kegiatan apapun.

Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan, seperti orang lanjut usia, cacat jasmani dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi . sementara itu, Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu (pada masa referensi survei) mempunyai pekerjaan, baik yang memang

melakukan aktifitas bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena satu dan lain hal seperti sedang cuti, menunggu panen, atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja profesional seperti penyanyi, dukun, dalang, dsb).

Selain itu, termasuk pula kedalam kategori angkatan kerja yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan (pengangguran).

Penduduk angkatan kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu: i. Bekerja, yaitu orang yang melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Kegiatan tersebut dilakukan selama minimal satu jam berturut-turut tanpa terputus dalam seminggu yang lalu (waktu referensi survei).

Pekerja keluarga yang tidak dibayar juga termasuk kelompok penduduk yang bekerja karena mereka membantu memperoleh penghasilan. Diantara kelompok orang yang bekerja, terdapat dua kategori, yakni mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sementara tidak bekerja.

Sementara tidak bekerja, yaitu seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi

selama seminggu yang lalu (masa referensi survei) sedang sementara tidak bekerja karena berbagai sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, dan sebagainya. Termasuk pula para pekerja profesional (pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu/khusus seperti penyanyi, pengacara, dalang, dukun, dll) yang sedang menunggu pekerjaan selanjutnya, menunggu pesanan, atau sementara tidak bekerja karena sakit.

Untuk mengetahui jumlah penduduk yang bekerja, dapat dihitung dari beberapa kriteria tersebut dengan rumusan:

Penduduk bekerja =
Penduduk yang aktif bekerja
+ penduduk yang sementara tidak bekerja

Berdasarkan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu (masa referensi survei), mereka yang aktif bekerja dibedakan menjadi 2 golongan:

- Pekerja penuh, yaitu pekerja yang bekerja selama minimal 35 jam (secara kumulatif) selama seminggu yang lalu (masa referensi survei).
- Pekerja tidak penuh, yaitu pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu.

Pekerja tidak penuh terdiri dari:

- Setengah penganggur/ setengah penganggur terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

- Pekerja paruh waktu/ setengah penganggur sukarela, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Pengangguran yaitu orang yang belum memiliki pekerjaan atau seseorang yang ingin bekerja dan/atau memiliki kemampuan bekerja tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Beberapa kriteria pengangguran antara lain:

- Mencari Kerja, yaitu orang yang berusaha mencari pekerjaan (tidak terbatas pada seminggu yang lalu), seperti mereka:
 - a. belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - b. sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - c. bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Penelitian Terdahulu

Nizar (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Rustiono(2008) dalam penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, lubis(2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan merupakan suatu cara yang ilmiah dalam mendapatkan data sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2017). Selanjutnya penelitian membutuhkan desain penelitian. Adapun fungsi dari desain penelitian untuk membantu pelaksanaan agar penelitian dapat berjalan dengan lancar (Ewa P, dkk, 2022).

Pada penelitian ini digunakan metode analisis data asosiatif deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Untuk megolah data kuantitatif

digunakan dengan menggunakan program SPSS.18. Penelitian dilaksanakan di bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh data time series (data deretan waktu) yaitu Tenaga Kerja dan Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) kota Palembang sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi yang diambil selama 5 tahun dari 2017 – 2021.

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Berdasarkan pengambilan sampel tersebut, maka peneliti dapat memperoleh jumlah sampel (n) dari data time series selama periode tahun 2017-2021.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh Tenaga kerja terhadap pertumbuhan Ekonomi di kota Palembang. Pada penelitian ini menggunakan model General Linear Model. Pada awalnya kita menggunakan regresi linear biasa melalui bantuan SPSS. Namun setelah dietelah dilakukan proses uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heterokedasitas dan uji multikolinieritas, mrb =aka

hasil pengolahan data melalui alat stata dapat dijelaskan hasilnya tidak signifikan semua variabelnya. Untuk mengatasi hal tersebut kita gunakan General Linier Model (GLM) seperti pada Gambar.1 dibawah ini

Coefficients^a

Model	B	Std. Error	Sig.
(Constant)	--		
Ln Naker	11.825	5.6460	.0362
Ln UMKM	1.257	.4175	.0031
	-.013	.0041	.0015

Gambar 1. Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas model estimasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{LnPdrb} = b_1\text{LnUMKM} + b_2\text{LnNaker} + e$$

Maka nilai estimasinya adalah

$$\text{LnPdrb} = 1,257\text{Lnaker} - 0,013\text{LnUMKM} + e$$

Perlu juga dijelaskan disini PDRB merupakan proxy dari pertumbuhan ekonomi. Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien pada variabel Tenaga kerja sebesar 1,257 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan jumlah

Tenaga Kerja sebesar 1 orang juta rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 1,257 Miliar rupiah.

2. Nilai koefisien UMKM kerja sebesar - 0.013 menunjukkan bahwa bahwa jika terjadi penambahan 1 UMKM akan menurunkan PDRB sebesar 0,013 miliar rupiah namun tidak signifikan.

Pada Penelitian ini yang akan kita bahas hanya variabel tenaga kerja saja. Sementara variabel UMKM tidak kita bahas pada penelitian ini.

Uji t-statistik

Uji t statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan dengan uji tstatistik, adapun caranya yaitu dengan melihat t thitung lalu kita bandingkan dengan ttabel atau dengan cara lainnya yaitu cukup dengan melihat nilai probabilitasnya atau p.value.jika nilai p value bernilai dibawah 0,005 maka dia signivikan pada level 5 persen. Namaun jika besar p value berada dibawah 0.010 maka signifikan pada level 10 persen. Jika nilai p value diatas 0,010 berarti tidak signifikan. Pada penelitian ini hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Variabel Tenaga Kerja mempunyai nilai signifikannya sebesar 0,003. Jika melihat nilai 0,003 lebih kecil dari 0,005 berarti dapat disimpulkan bahwa variabel Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yg di proxy oleh nilai PDRB di kota Palembang
2. Variabel UMKM nilai signifikannya sebesar 0,002 berarti lebih kecil dari 0,005 berarti dapat disimpulkan bahwa variabel UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Palembang.

Kesimpulan dan Saran

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Variabel Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Palembang . Pada penelitian ini disarankan untuk mengkaji lebih dalam terhadap variabel UMKM jika dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi di kota Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- Nizar, c, Hamzah, A, dan Syahnur,(2013), Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Volume 1, No. 2, Mei 2013, Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Todaro , Michael. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004.
- Rustiono, Dedy (2008). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.(Tesis), <http://eprints.undip.ac.id/16937/1> dirujuk tanggal 29 nop 22 jam 3.15 wib.
- Lubis (2014), Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja , Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal ekonomi, Vol.10
-(2020). Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang 2020.Badan Pusat Statistik Kota Palembang.

TINJAUAN KRITIS KEBERADAAN ORGANISASI PEMERINTAH PASCA PEMBERLAKUAN DESENTRALISASI

(Mengacu Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Ibrahim Hamid

Ibrahim Hamid Widyaaiswara Ahli Madya, email: ibrahim_plgskynian@yahoo.com,

Hp.081227222782

ABSTRAK

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan memosisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan utama dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Sedangkan tujuan kesejahteraan mengisyaratkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis.

Di dalam Pasal 9 UU No 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya ada yang terkait dengan 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam pelaksanaannya konsep desentralisasi memerlukan proses yang tidak mudah. Sehingga ada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terpaksa direvaluasi keberadaannya Berdasarkan perkembangan dan perubahan nomenklatur yang dinamis mengakibatkan langkah penyesuaian pelaksanaan pelayanan masyarakat yang juga ikut berubah. Keadaan ini akan mengakibatkan keterlambatan dan terjadinya kondisi inkonsistensi dalam pelayanan. Oleh karena itu penulis menyarankan beberapa langkah yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perubahan nomenklatur maupun mengevaluasi OPD yang sudah. Ada beberapa tahapan yang disarankan, antara lain: 1.Evaluasi terhadap nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah 2.Identifikasi Internal dan Eksternal Organisasi dengan metode SWOT 3.Menganalisis Masalah Organisasi 4.Menganalisis Keputusan 5. Menganalisis Masalah Potensial

Kata kunci: desentralisasi, demokrasi, pendidikan politik, kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

1.Latar Belakang Histori

Dari catatan sejarah sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebijakan desentralisasi sudah pernah diberlakukan melalui undang-undang Belanda desentralisasi (*desentralisatie wet*) tahun 1903. Nama asli *Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie* itu

diundangkan pada tanggal 23 Juli 1903 (dipublikasikan lewat *Nederlandsche Staatsblad* No. 329) merupakan amandemen terhadap *Regeringsreglement* 1854 (RR 1854). *Regeringsreglement* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti peraturan pemerintah atau yang biasa disebut dengan konstitusi. Amandemen *Regeringsreglement* 1854 (RR 1854) tersebut dilakukan dengan

menambahkan tiga pasal baru yang disisipkan diantara pasal 68 dan pasal 69 RR 1854 yaitu Pasal 68a, 68b dan 68c. Dengan adanya tiga pasal baru ini dimaksudkan agar reorganisasi pemerintahan menuju terwujudnya desentralisasi administratif di daerah-daerah akan dimungkinkan.

Pasal 68 RR 1854 yang sudah ada sejak semula pada pokoknya berisi empat hal, yaitu :

- Wilayah Hindia Belanda akan dibagi ke dalam satuan-satuan daerah dan pembagian itu akan dilakukan oleh raja.
- Pemerintahan di daerah-daerah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat tinggi (hoofdambtenaren) yang sebutan jabatannya akan ditentukan kemudian.
- Gubernur Jenderal akan menetapkan instruksi-instruksi berkenaan dengan hubungan para pejabat tinggi daerah itu dengan berbagai pihak yang lain.
- Kekuasaan sipil adalah kekuasaan yang tertinggi di daerah-daerah.

Kebijakan desentralisasi Belanda tetap diberlakukan pada zaman penjajahan Jepang .

Selanjutnya setelah kemerdekaan di deklarasikan secara politis dan konstitusional lahirlah kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam naskah penyusunan Undang-Undang Dasar terlihat pertimbangan-pertimbangan yang diajukan para pendiri Republik bahwa mereka sepakat melaksanakan kebijakan desentralisasi. Dari mulai Indonesia merdeka hingga kini, diberlakukan kebijakan desentralisasi dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan memosisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal

yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan utama dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Sedangkan tujuan kesejahteraan mengisyaratkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk meninjau Kembali organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi, baik dari segi internal maupun eksternal pasca penerapan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

3. Ruang Lingkup

Tulisan ini dibatasi pada ruang lingkup organisasi perangkat daerah dalam memberlakukan kebijakan desentralisasi yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

4. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka. dalam penelitian ini penulis membandingkan data yang didapat dari sebuah penelitian dilapangan dengan standar yang dianjurkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2014)

5. Landasan Teori

Dikemukakan oleh Nawawi (2012) bahwa Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hoessein (2005) mengemukakan bahwa ada tiga pengertian desentralisasi yaitu: pengertian yang

sempit dengan tidak mencakup dekonsentrasi, pengertian luas yang mencakup dekonsentrasi dan pengertian sangat luas yang mencakup dekonsentrasi dan subkonsep lainnya seperti delegasi, devolusi, dan swastanisasi/privatisasi Rondinelli dalam Boessein (2005) mengatakan bahwa desentralisasi adalah transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal. Dalam sudut pandang lain Koswara (2000) melihat otonomi daerah sebagai landasan untuk bereksprei dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi dan keanekaragaman daerah.

B. Hasil dan Pembahasan

Dari kajian literatur dan berdasarkan perkembangan dan perubahan nomenklatur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dinamis mengakibatkan langkah penyesuaian pelaksanaan pelayanan masyarakat yang juga ikut berubah. Keadaan ini akan mengakibatkan keterlambatan dan terjadinya kondisi inkonsistensi dalam pelayanan. Oleh karena itu penulis menyarankan beberapa langkah yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perubahan nomenklatur OPD

1. Evaluasi terhadap nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah

Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal. Di dalam Pasal 9 UU No 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya ada yang terkait dengan 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam pelaksanaannya konsep desentralisasi memerlukan proses yang tidak mudah. Sehingga ada OPD yang terpaksa dihapuskan selanjutnya hanya bidang-bidang tertentu dari OPD tersebut yang masih tetap dipertahankan. Namun merupakan bagian dari OPD baru. Misalnya Dinas Peternakan Provinsi sekarang hanya tinggal 2 bidang, yaitu: 1. Bidang Produksi Peternakan dan 2. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Akibatnya aset OPD Dinas Peternakan yang masih berfungsi baik tidak dapat dipergunakan secara optimal.

Oleh karena itu diperlukan beberapa perhitungan dan pertimbangan agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan benar sehingga apa yang dicita-citakan dalam tujuan desentralisasi dapat tercapai secara optimal.

2. Identifikasi Internal dan Eksternal Organisasi dengan metode SWOT

2.1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi

Memimpin dan menjalankan sebuah organisasi dengan sebuah tujuan, maka tidak dapat dilepaskan dari memikirkan strategi-strategi untuk memajukan organisasi tersebut dalam pencapaian tujuan organisasi. Banyak pemimpin organisasi menjalankan organisasi hanya dengan rutinitas administratif, serta plagiasi kegiatan kepemimpinan organisasi sebelumnya sebagai sarana pemenuhan kewajiban menjalankan program, tanpa melihat capaian dalam organisasi tersebut. Dalam pelaksanaan tugas, pemimpin seperti ini biasanya kurang peka terhadap organisasi dan tidak tahu strategi yang efektif dan tepat untuk dipakai dalam kepemimpinannya.

Strategi dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dirumuskan sebelumnya dengan melakukan suatu analisis terhadap keseluruhan indikasi dalam organisasi tersebut. Dengan mengadakan analisis maka sang pemimpin mampu menemukan formula (strategi) yang baik untuk mengarahkan seluruh potensi organisasi, guna pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin seperti inilah yang cerdas dalam memimpin serta mengarahkan organisasi maju kedepan, dan bukan pada hanya rutinitas organisasi.

2.2. Mengidentifikasi peluang dan ancaman organisasi

Selain kekuatan dan kelemahan, diperlukan juga identifikasi peluang dan ancaman terhadap organisasi, yaitu:

- a. Opportunities (Peluang) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif, yang dapat dan mampu mengarahkan kegiatan organisasi kearahnya. Misalnya:
 - Adanya program bantuan perbaikan saluran dari pemerintah

- Tersedianya tenaga teknis yang disiapkan pihak pembina
 - Kebutuhan lingkungan sesuai dengan tujuan organisasi, masyarakat lagi membutuhkan perubahan,
 - tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bagus,
 - belum adanya organisasi lain yang melihat peluang tersebut,
- b. Threats (Ancaman) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang mampu menghambat pergerakan organisasi. Misalnya:
- masyarakat sedang dalam kondisi apatis dan pesimis terhadap organisasi tersebut,
 - kegiatan organisasi seperti itu lagi banyak dilakukan oleh organisasi lainnya sehingga ada banyak competitor atau pesaing,
 - Adanya peraturan yang kurang mendukung pergerakan organisasi

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat digambarkan dalam metode SWOT sebagai berikut:

Secara Internal ditemukan Strength (kekuatan)

1. Jumlah personil
2. Aset dan peralatan yang dimiliki
3. Dana Kas yang tersedia
4. Teknologi yang cukup
5. Peraturan yang mendukung

Weakness (kelemahan)

1. Kekurangan dana,
2. Memiliki orang-orang baru yang belum terampil,
3. Belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organisasi,
4. Anggota kurang kreatif dan malas,
5. Tidak adanya teknologi dan sebagainya.

Secara Eksternal

Opportunity (Kesempatan)

1. Adanya program bantuan perbaikan saluran dari pemerintah
2. Tersedianya tenaga teknis yang disiapkan pihak pembina
3. Kebutuhan lingkungan sesuai dengan

- tujuan organisasi,
4. masyarakat lagi membutuhkan perubahan,
5. tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bagus,
6. belum adanya organisasi lain yang melihat peluang tersebut,

Threats (Ancaman)

1. masyarakat sedang dalam kondisi apatis dan pesimis terhadap organisasi tersebut,
2. Kegiatan organisasi seperti itu lagi banyak dilakukan oleh organisasi lainnya sehingga ada banyak competitor atau pesaing,
3. Adanya peraturan yang kurang mendukung pergerakan organisasi

Untuk mengatasi Kelamahan dan Ancaman, diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Metode 1. *Strength dan Opportunity (SO)*

1. Kerahkan jumlah personil untuk mendukung program perbaikan saluran dengan bekerjasama dengan tenaga teknis yang disiapkan pemerintah
2. Manfaatkan program bantuan perbaikan saluran untuk meningkatkan nilai guna aset dan peralatan yang dimiliki
3. Optimalkan persaturan yang mendukung tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bagus,

Metode 2. *Strength dan Threat (ST)*

1. Atasi masyarakat sedang dalam kondisi apatis dan pesimis terhadap organisasi dengan melengkapi personil yang mampu memahami organisasi
2. Atasi Kejenuhan organisasi dengan memberikan kemampuan teknologi
3. Adanya peraturan yang kurang mendukung pergerakan organisasi

Metode 3. *Weaknes dan Opportunity (WO)*

1. Atasi Kekurangan Dana dengan memanfaatkan bantuan perbaikan saluran dari pemerintah
2. Atasi orang-orang baru yang belum

terampil dengan memanfaatkan tenaga teknis yang disiapkan pihak pembina

3. Atasi belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organisasi, dengan membuat linglungan sesuai dengan tujuan organisasi

Metode 4 *Weakness dan Threath* (WT)

1. Minimalkan kekurangan dan dana dan hindari kondisi apatis dan pesimis terhadap organisasi tersebut,
2. Minimalkan anggota organisasi memiliki pengetahuan yang minim mengenai organisasi, dan hindari organisasi lainnya sehingga ada banyak kompetitor atau pesaing,
3. Minimalkan anggota kurang kreatif dan malas dan hindari aturan yang kurang mendukung pergerakan organisasi

2.3. Merumuskan skala prioritas

Skala prioritas adalah suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya.

Penentuan skala prioritas dalam memilih kebutuhan sangat diperlukan agar kebutuhan yang sifatnya mendasar dan dapat menimbulkan masalah apabila tidak terpenuhi tidak terkalahkan oleh kebutuhan yang dapat ditunda.

Adanya keterbatasan sumber daya pemuas kebutuhan manusia mendorong manusia untuk melakukan berbagai pilihan dari segala sesuatu yang tersedia dan dapat dipilih.

3. Menganalisis Masalah Organisasi

3.1. Menguraikan kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual

Analisis kesenjangan/ gap adalah studi yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem saat ini telah memenuhi kebutuhan. Analisis gap mengidentifikasi bagaimana kegiatan organisasi diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan tetapi belum atau tidak bisa

dipenuhi. Untuk itu alternatif-alternatif akan dikembangkan pada saat penyebab kesenjangan fungsi ditemukan. dengan mengkombinasikan antara lain:

Analisis kesenjangan terdiri dari tiga komponen faktor utama yaitu:

- 1) Daftar karakteristik (seperti atribut, kompetensi, tingkat kinerja) dari situasi sekarang (apa yang saat ini),
- 2) Daftar apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan (apa yang harus), dan
- 3) Daftar kesenjangan apa yang ada dan perlu diisi. Analisis kesenjangan akan memicu organisasi untuk memikirkan kondisi dan kemampuan apa yang saat ini dimiliki oleh organisasi dan merencanakan apa yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi bahkan menghilangkan kesenjangan yang ada dalam organisasi.

Adapun langkah-langkahnya untuk mengatasi kesenjangan dari beberapa ahli dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). *Ranking Requirements*, yaitu memastikan implementasi sistem yang baru dan memastikan area-area yang penting bagi organisasi yang memberikan nilai tambah bagi ASN dalam melaksanakan pelayanan;
- 2). *Degree of Fit* yaitu menentukan sejauh mana kebutuhan dapat diakomodir oleh sistem yang baru;
- 3) *Gap Resolution* yaitu menentukan alternatif dan merekomendasikan solusi untuk mengatasi gap yang ada. Suatu analisis kesenjangan, yang membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan kinerja yang ideal,

3.2. Mengelompokkan kesenjangan sesuai dengan skala prioritas

Memfokuskan keputusan pemimpin didasarkan atas perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan ilmu kepemimpinan yang biasa dimulai dengan langkah :

1. merumuskan masalah
2. Menyusun model Aritmatik
3. Mendapatkan penyelesaian dari model
4. Mengkaji model dan hasil mode
5. Menetapkan pengawasan atas hasil

4. Menganalisis Keputusan

Analisis keputusan adalah pola berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, pengembangan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif tindakan yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria dan mengidentifikasi kemungkinan resiko yang melekat pada suatu keputusan tersebut.

4.1. Merumuskan alternatif penanganan sesuai analisis masalah

Untuk mencapai beberapa sasaran antara seperti yang telah diuraikan sebelumnya diperlukan adanya suatu keputusan tindakan yang akan dilakukan dari beberapa alternatif. Untuk itu, dilakukan analisis keputusan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

a. Merumuskan Pernyataan Keputusan

Tujuan merumuskan pernyataan keputusan adalah untuk memusatkan perhatian pada tindakan yang terpilih dalam tahap pengidentifikasian alternatif tindakan sebagai dasar untuk melaksanakan keputusan yang akan ditempuh dalam usaha mengembangkan perusahaan.

b. Menetapkan Kriteria Keputusan

Kriteria keputusan adalah kemampuan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan yang lebih terperinci tentang hasil keputusan yang diambil. Tujuan penetapan kriteria adalah untuk menyaring sejumlah alternatif lain yang pada akhirnya akan muncul satu alternatif terbaik.

4.2. Menentukan keputusan alternatif

a. Menetapkan Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan adalah kemungkinan-kemungkinan pilihan bagi pencapaian tujuan dari pernyataan keputusan. Dari berbagai alternatif, akan dipilih yang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Pertimbangan pokoknya adalah mana yang paling memenuhi kriteria dan paling kecil resikonya bila alternatif itu dijalankan.

b. Menentukan Bobot Masing-Masing Kriteria

Penentuan bobot berdasarkan besar-kecilnya pengaruh kriteria terhadap alternatif keputusan. Semakin besar pengaruhnya maka bobotnya lebih besar dan sebaliknya. Jumlah bobot untuk seluruh kriteria adalah satu (1)

c. Membuat Matriks Penilaian

Matriks penilaian bertujuan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif yang paling baik yang dapat memenuhi sasaran. Dalam matriks ini digunakan sistem pembobotan, dimana kriteria dan alternatif keputusan diberi bobot kemudian diperkalikan.

d. Menentukan Tindakan Terpilih

Hasil perkalian antara kriteria dan alternatif keputusan yang memiliki bobot tertinggi merupakan alternatif prioritas. Alternatif yang menjadi prioritas merupakan tindakan terpilih untuk mencapai sasaran utama.

5. Menganalisis Masalah Potensial

Sebagaimana yang telah telah disampaikan pada bab IV, bahwa perlu dilakukan pemecahan masalah secara sistematis. Akan tetapi kadangkala ada masalah yang tanpa terduga dapat terjadi disaat kita sedang menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang belum terjadi ini dapat dikatakan sebagai masalah potensial. Masalah potensial seringkali menyita sumber daya yang lebih besar dari masalah sebelumnya (masalah primer), karena masalah ini dapat merusak sistem perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dalam menghadapi masalah potensial tersebut.

5.1. Membuat proyeksi masalah yang akan terjadi akibat kebijakan

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah potensial adalah dengan membuat proyeksi terhadap masalah yang ada dengan masalah yang akan terjadi selanjutnya. Proyeksi dibuat berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal dari organisasi.

5.2. Merumuskan langkah antisipasi terhadap potensi masalah

Untuk mencegah terjadinya masalah potensial diwaktu yang akan datang, diperlukan beberapa strategi pencegahan. Fokus objek pengegahan adalah sumber daya manusia (SDM). Perencanaan Sumber Daya Manusia yang matang, kinerja karyawan dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan.

Langkah yang dapat dilakukan dalam merumuskan antisipasi adalah dalam merumuskan suatu tindakan yang memiliki pengaruh. Seperti melakukan kompensasi terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh karyawan, seperti pemberian *punishment and reward*. Sehingga setiap karyawan dapat menghasilkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 merupakan perwujudan dari konsep otonomi daerah berdasarkan kondisi daerah. Dalam Pasal 9 UU No 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya ada yang terkait dengan 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Walaupun otonomi daerah sebagai landasan untuk berekspresi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi dan keanekaragaman daerah, namun pada kenyataannya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum dapat

dilaksanakan dengan optimal. Keadaan ini perlu di evaluasi dan dikaji kembali apa sesungguhnya yang harus dilakukan untuk melayani masyarakat sehingga akan tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu ada beberapa metode yang telah disampaikan dengan harapan dapat memberikan sumbangsaran positif dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Hoessein Bhenyamin, et.al., "Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah", buku hasil kerja sama PKPADK FISIP-UI dan Kemen-PAN, Januari 2005, hlm.21
- Koswara,E. 2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya. CSIS XXIX Nomor 1, Jakarta.
- Juanda Nawawi, 2012. Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik. Menara Intan. Makassar.hal 36
- Sugiyono. 2014. Tata cara Riset Kuantitatif Kualitatif serta R&D. Bandung CV Alfabeta

Daftar Referensi

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah